

DAFTAR ISI

Jurnal Regional Planning

VOL 1 NO 2 Agustus 2019

Pengaruh Program Water Resources And Irrigation Sector Management Project (WISMP) Terhadap Produktivitas Padi Sawah Di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun	67 - 74
Rianti Fela, Marihot Manullang, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik	
Pengaruh Dana Bagi Hasil Provinsi Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun	75 - 84
Roy Sartana Napitupulu, Jef Rudiantho Saragih, Galumbang Hutagalung, Ringkop Situmeang	
Pengaruh Kepemimpinan, Pelatihan, Dan Budaya Organisasi Terhadap Peningkatan Komitmen Organisasi Pada Perserikatan Muhammadiyah Di Tebing Tinggi	85 - 95
Siti Ainun, Dearlina Sinaga, Hisarma Saragih, Sarintan E Damanik	
Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian Dan Pemberian Subsidi Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Padi (Studi Kasus Di Desa Silaen Kabupaten Toba Samosir)	96 - 107
Porman, Robert Tua Siregar, Marihot Manullang, Sarintan E Damanik	
Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar	108 - 121
Asril Nizar, Robert Tua Siregar, Sarintan E Damanik, Elidawati Purba	

PENGARUH PROGRAM *WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT* (WISMP) TERHADAP PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN

Rianti Fela¹, Marihot Manullang², Robert Tua Siregar³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan produktivitas padi sawah sebelum dan sesudah pelaksanaan *Water Resources and Irrigation Sector and Management Project* (WISMP) serta pengaruh Program WISMP terhadap produktivitas padi sawah di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata produktivitas pertanian antara sebelum dan setelah adanya Program WISMP di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil nilai t -hitung (-29,103) lebih kecil dari nilai t -tabel (0,679) pada taraf signifikansi 5%. Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata produktivitas pertanian padi sawah sebelum dan sesudah adanya Program WISMP di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil berikutnya adalah Program WISMP berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi sawah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel Program WISMP bernilai 0,001 dimana angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan 5%.

Kata Kunci : *Water Resources and Irrigation Sector and Management Project* (WISMP), Produktivitas Padi Sawah

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in lowland rice productivity before and after the implementation of the Water Resources and Irrigation Sector and Management Project (WISMP) and the influence of the WISMP Program on lowland rice productivity in Siantar District, Simalungun Regency. Based on the type of problem studied, the approach used is descriptive quantitative. The results showed that there was a difference between the average agricultural productivity between before and after the WISMP Program in Siantar District, Simalungun Regency. The t -count value (-29.103) is smaller than the t -table value (0.679) at the 5% significance level. From these results it can be seen that there are real differences in the productivity of paddy rice farming before and after the WISMP Program in Siantar District, Simalungun Regency. The next result is that the WISMP program has a significant effect on the productivity of paddy rice in Siantar District, Simalungun Regency. The results of the t test show that the significance value of the WISMP Program variable is 0.001, which is smaller than the specified significance level of 5%.

Keyword : *Water Resources and Irrigation Sector and Management Project* (WISMP), Paddy Field Productivity

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Negara Indonesia karena sektor pertanian memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah sebagai penyerap tenaga kerja; kontribusi

terhadap pendapatan; kontribusi dalam penyediaan pangan; pertanian sebagai penyedia bahan baku; kontribusi dalam bentuk kapital; dan pertanian sebagai sumber devisa.

Sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian adalah meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang tercermin melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian serta berkurangnya ketergantungan pangan impor, meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, serta meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sasaran akhir adalah peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa lainnya yang tercermin dari meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya produktivitas tenaga kerja pertanian, berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya jumlah penduduk yang kekurangan pangan dan turunnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Keberhasilan sektor pertanian khususnya pertanian padi sawah tidak terlepas dari keberadaan irigasi. Irigasi menjadi penting karena menjadi pembuluh darah arteri bagi pertanian padi sawah. Dalam realitanya permasalahan umum pertanian selain dari hama adalah irigasi yang kurang baik.

Keberhasilan irigasi pertanian khususnya untuk pertanian padi sawah tentunya akan membawa dampak positif bagi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas ini tentunya diharapkan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara swa sembabada pangan khususnya komoditi padi sawah.

Pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk memajukan irigasi pertanian Indonesia melalui beberapa program nasional. salah satu program andalan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah program WISMP (*Water Resources and Irrigation Sector and Management Project*).

WISMP merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian melalui penyempurnaan sitem pengaturan, pengelolaan kelembagaan, keberlanjutan fiskal, pengelolaan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air. Dimana pengelolaannya sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya air dan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas fisik dan ekonomi pertanian.

Water Resources and Irrigation Sector Management Progam atau disingkat WISMP adalah salah satu bentuk program nasional untuk pengelolaan sumberdaya air dan irigasi yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan memanfaatkan dana pinjaman luar negeri (Bank Dunia) dengan rencana jangka waktu pelaksanaan selama 15 tahun.

Tabel 1. Daerah Irigasi Kesepakatan Program WISMP II Kabupaten Simalungun

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Negeri Malela	469	Gunung Malela
2	Dolok Malela/ Bandan	578	Gunung Malela
3	Serapuh	192	Gunung Malela
4	Suko Sari	115	Gunung Malela
5	Batu III / Tomok	152	Gunung Malela
6	Gajing Masilom	133	Gunung Malela
7	Margo Mulyo	90	Gunung Malela
8	Silampuyang	207	Siantar
9	Semangat Baris	742	Siantar
10	Karang Bangun	200	Siantar
11	Batu IV Pantoan/ Laras II	910	Siantar
12	Pantoan	279	Siantar
13	Bandar Malela/ Silau Malela	233	Gunung Maligas

14	Tumorang	115	Gunung Maligas
15	Karang Anyer	341	Gunung Maligas
16	Marihat Lela	120	Gunung Maligas
17	Pinang Ratus	292	Jorlang Hataran
18	Bah Sampuran	160	Jorlang Hataran
19	Saribu Jawa/ Ujung Bondar	740	Dolok Panribuan
20	Bah Kikat/ Dolok Maraja	760	Dolok Panribuan
21	Bahal Gajah/ Tiga Bolon	530	Sidamanik
22	Bah Tangan I-II	968	Sidamanik
23	Bah Tongguran III	754	Hutabayu Raja
24	Bah Lombut III	833	Hutabayu Raja
25	Perdagangan	504	Bandar
26	Maligas Tengah	790	Tanah Jawa

Sumber: Bappeda Kabupaten Simalungun, 2016

Program WISMP ini sendiri telah berjalan mulai tahun 2005 yang direncanakan akan berakhir di tahun 2018 yang dilaksanakan secara 3 tahapan. Fokus utama pengelolaan WISMP adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu dari 3 kabupaten di Sumatera Utara yang mendapatkan bantuan program WISMP ini. Pada saat ini Kabupaten Simalungun sedang menjalankan program WISMP II tahap 3 periode 2015 - 2018. Pada tahapan ini, program WISMP dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Siantar memperoleh kesempatan sebagai lokasi proyek yang ditangani WISMP pada tahun 2015. Dana yang dikucurkan untuk seluruh Daerah Irigasi yang ada di Kecamatan Siantar pada tahun 2015 berjumlah Rp.1.080.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian serta pemberdayaan P3A/ GP3A yang ada di 5 Daerah Irigasi Kesepakatan yang ada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Di Kecamatan Siantar sendiri terdapat 5 Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang masing-masing berada di wilayah DI. Sedangkan total keseluruhan P3A yang ada di Kecamatan Siantar adalah 22 kelompok P3A.

Tabel 2. Data P3A dan GP3A di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Tahun 2015

No	Daerah Irigasi (DI)	P3A	GP3A
1	Silampuyang	3	1
2	Semangat Baris	5	1
3	Karang Bangun	3	1
4	Batu IV Pantoan/ Laras II	7	1
5	Pantoan	4	1
Total		22	5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, 2016

Pada tahun 2014, penggunaan lahan untuk pertanian sawah di Kecamatan Siantar tercatat sebesar 2.026 Ha dengan luas panen bersih tanaman padi sawah sebesar 4.271 Ha dengan tingkat produksi 25.391 ton dan produktivitas 5,94 ton/ ha.

Sebelum adanya program WISMP APL II di Kecamatan Siantar, petani sebelumnya masih banyak bergantung pada pola-pola lama. Petani banyak bergantung kepada petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang dimana jumlah personilnya masih sangat terbatas.

Oleh karena itu peningkatan keberdayaan petani dalam memajukan usaha pertaniannya sendiri pun masih kurang.

Hadirnya WISMP di Kecamatan Siantar, tentunya tentunya membawa dampak tersendiri bagi para petani di Kecamatan Siantar. Dengan semakin membaiknya jaringan irigasi dan terlaksananya pemberdayaan petani maka tentunya bisa menambah produktivitas pertanian khususnya padi sawah yang berujung pada peningkatan pendapatan. Dari fenomena yang terjadi apakah program WISMP yang dijalankan di Kecamatan Siantar berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi sawah dan apakah program tersebut juga bisa meningkatkan pendapatan petani menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan dalam suatu penelitian. maka dari itu penulis merasa tertarik mengadakan suatu penelitian mengenai keberhasilan program WISMP di Kecamatan Siantar khususnya dengan mengangkat judul “Pengaruh Program *Water Resources and Irrigation Sector Management Project* (WISMP) terhadap Produktivitas Padi Sawah di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis mencoba mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan, kemudian mencari dan menyajikannya sebagai data statistik yang kemudian diolah dengan menggunakan alat uji statistik dan mendeskripsikan kembali hasil penelitian tersebut. Data diperoleh langsung dari objek penelitian seperti hasil observasi dan wawancara. Untuk analisis data digunakan metode Pengujian Sampel Berpasangan (*paired sampel T Test*), yaitu untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata - rata antara dua kelompok sampel yang berpasangan (Sugiyono, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kecamatan Siantar

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Gubernur Wilayah Sumatera Tengku Muhammad Hasan dipercaya menyusun Pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Sumatera. Khusus untuk wilayah Simalungun diunjuk Tuan Maja Purba sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia. Kedudukan Tuan Maja Purba pernah digantikan oleh Urbanus Pardede pada permulaan tahun 1947, akan tetapi diangkat kembali menjadi Kepala Daerah Simalungun pada bulan Juni 1947. Saat itu Kecamatan Siantar dipimpin oleh Sabtu Siregar.

Pada tanggal 29 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan kepada Bangsa Indonesia dari Pemerintah Belanda dalam bentuk negara serikat, sehingga sejak 28 Desember 1950 Tuan Maja Purba menjadi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun merangkap Kepala Pemerintahan Kotapraja Pematang Siantar.

Kondisi Geografi dan Administrasi

Kecamatan Siantar merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang ada di lingkungan daerah pemerintahan Kabupaten Simalungun. Kecamatan ini memiliki luas 76,35 km² atau 1,80% dari total luas Kabupaten Simalungun.

Sebelah utara Kecamatan Siantar berbatasan dengan Kecamatan Gunung Maligas, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kota Pematang Siantar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malela.

Kecamatan Siantar terletak antara: 02°52'22" - 02°59'56" LU dan 99°01'18" - 99°09'19" Bujur Timur. Secara administrasi, Kecamatan Siantar berada di tengah - tengah Kabupaten Simalungun. Suhu rata - rata adalah 24,7°C dan curah hujan 2808 mm/tahun.

Potensi Sumber Daya Alam

a. Kondisi Topografi

Letak Kecamatan Siantar di atas permukaan laut adalah 151-750 meter. Berdasarkan topografinya, daerah ini terdapat pada ketinggian 251-400 m seluas 5.266 Ha, ketinggian 401-500 m seluas 1.580 Ha, dan 501-750 m seluas 1.065 Ha dari keseluruhan luas wilayah. Menurut kemiringan/ kelerengan tanah, luas wilayah Kecamatan Siantar terdapat pada lahan yang kemiringannya 0-2 % seluas 4.760 Ha dan 2-15 % seluas 3.898 Ha.

Kondisi topografi dan kelerengan merupakan salah satu faktor utama dalam mempertimbangkan rencana pemanfaatan ruang dan bersifat “given” sehingga dalam pemanfaatannya untuk dapat berfungsi sebagai kawasan budidaya khususnya pada kondisi topografi dan kelerengan yang curam / sangat curam membutuhkan teknologi yang tinggi. Dengan demikian kondisi topografi dan kelerengan merupakan potensi sekaligus batasan dalam pengembangan lahan.

Berdasarkan kondisi eksisting topografi dan kelerengan yang ada di Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut morfologi, sangat beragam dari landai, bergelombang, curam hingga sangat curam. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan wilayah jika dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan.

Proporsi wilayah menurut penggunaan lahan, di Kecamatan Siantar penggunaan lahan terbesar digunakan untuk kebutuhan lain-lain baik itu berupa pemukiman, perkantoran maupun kebutuhan sosial lainnya sebanyak 46,66 %. Sedangkan penggunaan lahan terbesar kedua digunakan untuk lahan sawah yaitu sebesar 26,53 %, penggunaan lahan untuk halaman pekarangan ada sebesar 17,18 % dan terakhir lahan kerinnng sebesar 9,63 %.

b. Kondisi Demografi

Tahun 2014 penduduk Kecamatan Siantar adalah 65.335 jiwa yang terdiri dari 32.490 laki-laki dan 32.845 perempuan, dan mempunyai kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap total penduduk Kabupaten Simalungun. Tingkat kepadatan penduduk kecamatan Siantar adalah 826 jiwa/ km². Di Kecamatan Siantar ada 15.665 Rumah tangga. Hal ini menjelaskan bahwa dalam satu rumah tangga rata-rata mempunyai 4 anggota rumah tangga. Penduduk Kecamatan Siantar yang termasuk dalam kategori usia produktif yaitu yang berumur 15 sampai 54 tahun sebanyak 36.825 jiwa dari jumlah penduduk. Rasio jenis kelamin Kecamatan Siantar tahun 2014 sebesar 99,10 ini dimana jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Siantar lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2015, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.490 jiwa dan perempuan 32.845 jiwa.

c. Profil Pertanian di Kecamatan Siantar

Secara umum, pertanian di Kecamatan Siantar didominasi oleh pertanian padi sawah dengan luas panen tahun 2014, 4.271 Ha dengan produksi 25.391 ton dan tingkat produktivitas 5,945 ton/ha. Selanjutnya tanaman jagung dengan luas panen 586 ha dengan produksi 3.561 ton dan produktivitas 6,077 ton. Terakhir tanaman ubi kayu dengan luas panen 39 Ha, produksi 1.485 ton dan produktivitas 38,070 ton/Ha.

Gambaran Umum Pelaksanaan WISMP di Kecamatan Siantar

WISMP adalah Water Resources Sector Management Program, yang mendapat bantuan luar negeri yang berasal dari Bank Dunia melalui Loan 4711 - IND, Credit CR.3807 dan Grant TF. 052124. Program dan kegiatan ini awalnya direncanakan pelaksanaannya dari tahun 2005 s/d 2015, namun kegiatan ini masih berlanjut hingga tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap beberapa hal seperti mekanisme pencairan dana dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Harapan pelaksanaan program WISMP ini adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya air secara integratif, yang menghasilkan produktifitas yang diharapkan. Dengan demikian maka WISMP merupakan bantuan program yang memberikan stimulasi terhadap kemampuan lembaga dan institusi pelaksana pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Kata kunci yang perlu dicermati adalah melakukan koordinasi antar instansi dalam mencapai tujuan akhir pembangunan di bidang Sumber Daya Air.

Tahapan awal pelaksanaan WISMP tahun 2015 sebenarnya telah direncanakan mulai tahun 2014 dengan penyusunan Annual Work Plan (AWP) atau rencana kerja tahunan, kemudian penetapan Daerah Irigasi Kesepakatan serta Pembentukan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).

WISMP APL II yang dilaksanakan di Kecamatan Siantar khususnya dan di Kabupaten Simalungun pada umumnya merupakan tindak lanjut dari Program WISMP APLI I yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2013. Kegiatan ini kembali dilanjutkan dengan penyusunan AWP pada tahun 2014 untuk pelaksanaan tahun 2015. Fokus pelaksanaan WISMP APL II berbeda dari WISMP APLI I. Pada WISMP APL II, pemberdayaan petani melalui perkuatan kelembagaan P3A dan GP3A menjadi fokus utama pembangunan WISMP APL II.

Pelaksanaan WISMP pada tahun 2015 di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun merupakan salah satu komitmen yang tertera dalam DI Kesepakatan untuk WISMP APL II di Kabupaten Simalungun Tahun 2015-2018. Pelaksanaan kegiatan ini sendirinya ditangani oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun.

Bappeda dalam pelaksanaan WISMP ini memegang peranan sebagai koordinator dan juga sebagai instansi teknis pengelolaan WISMP. Sebagai koordinator, Bappeda bertanggungjawab atas perencanaan kegiatan, serta segala laporan progres fisik dan keuangan yang menyangkut kegiatan WISMP harus diketahui dan disahkan oleh Bappeda Simalungun. Sebagai instansi teknis, Bappeda dalam pelaksanaan WISMP melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Uraian kegiatan pelaksanaan WISMP tahun 2015 di Kecamatan Siantar yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar Pembentukan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM)
- b. Fasilitasi Perkuatan Komisi Irigasi Kabupaten
- c. Fasilitasi biaya operasional TPM dan KTPM di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
- d. Fasilitasi Penyusunan PSETK (Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan) di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar

- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fisik dan keuangan
Selanjutnya uraian kegiatan WISMP tahun 2015 yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kecamatan Siantar adalah sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Desain Partisipatif untuk GP3A di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - b. Pelatihan Konstruksi Partisipatif untuk GP3A di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - c. Pelatihan O & P Partisipatif untuk GP3A di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - d. Penilaian Tingkat Partisipasi GP3A di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan SiantarUraian kegiatan WISMP tahun 2015 yang dikelola Dinas Pertanian di Kecamatan Siantar adalah sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - b. Revitalisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - c. Revitalisasi Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - d. Fasilitasi Legalisasi GP3A di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - e. Pelatihan GP3A dalam aspek manajemen organisasi dan keuangan di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - f. Sosialisasi perubahan kebijakan dalam rangka sinergitas P3A/GP3A dengan Poktan/Gapoktan di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar
 - g. Identifikasi dan fasilitasi sinergitas P3A/GP3A dengan Poktan/Gapoktan di 5 DI Kesepakatan di Kecamatan Siantar

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan antara rata-rata produktivitas pertanian antara sebelum dan setelah adanya Program WISMP di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil nilai t-hitung (-29,103) lebih kecil dari nilai t-tabel (0,679) pada taraf signifikansi 5%. Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata produktivitas pertanian padi sawah sebelum dan sesudah adanya Program WISMP di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima yang menyatakan ada perbedaan antara rata-rata produktivitas pertanian antara sebelum dan setelah adanya Program WISMP.
- b. Program WISMP berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi sawah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel Program WISMP bernilai 0,001 dimana angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan 5%. Dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima yang menyatakan Program WISMP berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi sawah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

Chang, R., Hevia, C., & Loayza, N. Indonesia-Water Resources and Irrigation Sector Management Project: procurement plan.

- Cora, G. S., Rukmana, D., & Amrullah, A. (2018). Persepsi Petani Kakao Terhadap Teknik Sambung Samping Di Desa Batu Lappa, Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 15-30.
- Gany, A. H. A., Sharma, P., & Singh, S. (2019). Global review of institutional reforms in the irrigation sector for sustainable agricultural water management, including water users' associations. *Irrigation and drainage*, 68(1), 84-97.
- Kecamatan Siantar Dalam Angka tahun 2015. BPS Kabupaten Simalungun.
- Maman, U., Aminudin, I., & Novriana, E. (2021). Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(2), 176-196.
- Peraturan Menteri Pertanian No.273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan.
- Sihotang, C. H. P., Silalahi, M., Siregar, R. T., & Marbun, J. (2019). Pengaruh Persepsi, Perilaku, Dan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.575>
- Simalungun Dalam Angka Tahun 2015. BPS Kabupaten Simalungun.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usaha Tani*. UI-Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta:
- Suri, V., & Dinh, V. T. Indonesia-Water Resources and Irrigation Sector Management Project: procurement plan.
- Sutrisno, N., & Hamdani, A. (2019). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk meningkatkan produksi pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 73-88.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Yatman, H. N. (2011). Persepsi petani terhadap water resources and irrigation sector management program di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

**PENGARUH DANA BAGI HASIL PROVINSI DAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Roy Sartana Napitupulu¹, Jef Rudiantho Saragih², Galumbang Hutagalung³, Ringkop
Situmeang⁴**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial DBH Propinsi dan BKP Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun dan pengaruh simultan DBH Propinsi dan BKP Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Berdasarkan jenis masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan verifikatif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dan Bantuan Keuangan (BKP) Provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Dari hasil uji F (simultan) yang dilakukan, diperoleh F_{hitung} sebesar 14,358 dimana F_{tabel} adalah 4,74. Dengan demikian $F_{hitung} (14,358) > F_{tabel} (4,74)$, maka DBH dan BKP Provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Secara parsial Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. Nilai signifikansi DBH Provinsi diperoleh sebesar 0,03 lebih kecil dari signifikansi Alpha 0,05 yang menunjukkan bahwa DBH Provinsi berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara nilai signifikansi BKP Provinsi diperoleh sebesar 0,058 dimana nilai ini lebih besar dari nilai Alpha 0,05, dengan demikian BKP Provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, PDRB, Pengembangan Wilayah

ABSTRACT

This study aims to analyze the partial effect of Provincial DBH and Provincial BKP on the PDRB of Simalungun Regency and the simultaneous influence of Provincial DBH and Provincial BKP on the PDRB of Simalungun Regency. Based on the type of problem studied, the approach used is descriptive quantitative and quantitative verification. The results showed that the Provincial Revenue Sharing Fund (DBH) and Provincial Financial Assistance (BKP) simultaneously had a significant effect on the PDRB of Simalungun Regency. From the results of the F (simultaneous) test conducted, Fcount was obtained at 14.358 where Ftable was 4.74. Thus Fcount (14.358) > Ftable (4.74), then the Provincial DBH and BKP simultaneously have a significant effect on the PDRB of Simalungun Regency. Partially, the Provincial Profit Sharing Fund (DBH) has a significant effect on the Regional Development of Simalungun Regency. The significance value of Provincial DBH is 0.03 which is smaller than the Alpha significance of 0.05 which indicates that Provincial DBH has a significant effect on PDRB. While the significance value of the Provincial BKP was obtained at 0.058 where this value was greater than the Alpha value of 0.05, thus the Provincial BKP partially did not have a significant effect on the PDRB of Simalungun Regency

Keywords : Profit Sharing Funds, Financial Assistance, PDRB, Regional Development

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan otonomi daerah memberi kewenangan yang seluas - luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang

- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari pengertian diatas, otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentunya setiap daerah mempunyai kebutuhan anggaran pembiayaan masing-masing. Setiap daerah tidak dapat disamakan kebutuhan dana pembangunannya, hal tersebut tentunya tergantung dari wilayah geografi serta demografi daerah tersebut. Kebutuhan pembiayaan dana pembangunan daerah tersebut diikat dalam suatu peraturan daerah yang mengatur kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang lajim disebut dengan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Penerimaan pendapatan daerah baik itu bersumber dari dalam maupaun dari luar daerah itu sendiri akan dijadikan sebagai dasar pembelanjaan berbagai program dan kegiatan daerah baik itu yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan belanja tidak langsung dimaksudkan untuk membiayai kebijakan belanja daerah untuk membiayai gaji dan pengeluaran rutin daerah, sedangkan belanja langsung ditujukan untuk membiayai belanja modal pembangunan daerah yang langsung berkenaan dengan masyarakat/ sektor riil.

Kebijakan penggunaan APBD untuk pembiayaan pembangunan tergantung pada daerah itu sendiri. Keberhasilannya tidak diukur dari besar atau kecilnya belanja pembangunannya akan tetapi dari ketepatan sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian, semakin besar APBD suatu daerah, maka semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu dari 33 kabupaten / kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah 4.386,6 km² memuat populasi penduduk sebesar 830.986 jiwa pada tahun 2014. Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 31 wilayah kecamatan (BPS Simalungun, 2015)

Selayaknya sebuah daerah otonom, Kabupaten Simalungun juga memiliki APBD untuk membiayai belanja pembangunannya. Berikut disajikan data APBD Kabupaten Simalungun selama 10 tahun terakhir pada Tabel 1.

Tabel 1. APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2006-2015

Tahun	APBD (Rp.)	% pertumbuhan
2006	703.252.196.250	-
2007	798.418.785.994	13,53
2008	880.994.000.000	10,34
2009	937.193.000.000	6,38
2010	1.076.085.503.496	15,65
2011	1.175.756.118.573	9,26
2012	1.394.640.673.989	18,91
2013	1.432.130.758.505	5,27
2014	1.803.231.744.576	25,90
2015	2.167.169.703.249	20,18

Sumber: DPPKA Kab. Simalungun, 2016

Perkembangan APBD Kabupaten Simalungun setiap tahunnya menunjukkan tren menaik dengan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Simalungun selama 10 tahun terakhir berada pada kisaran 13,93%. Keberhasilan pembangunan suatu daerah disokong pula oleh bantuan pendanaan dari daerah lain atau daerah induknya. Seperti halnya dengan Kabupaten Simalungun, dimana pendapatan Kabupaten Simalungun tidak hanya berasal dari daerah saja namun terdiri dari dana transfer pusat yang disebut dengan Dana Perimbangan serta ada pula yang berasal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berupa Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana terdapat pada tabel 1.2. Pendapatan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil Propinsi dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Utara menunjukkan tren menaik setiap tahunnya. Sedangkan untuk sektor Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi menunjukkan tren yang tidak menentu setiap tahunnya.

Tabel 2. Perkembangan Dana Bagi Hasil Propinsi dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Tahun 2006 - 2015

Tahun	DBH Propinsi (Rp.)	BKP Propinsi (Rp.)
2006	17.888.752.300	8.775.580.750
2007	20.041.468.687	9.573.665.600
2008	22.041.468.687	8.873.706.796
2009	29.402.154.770	20.247.133.000
2010	33.909.395.055	12.882.740.000
2011	57.921.412.180	15.107.840.000
2012	53.726.292.000	169.589.928.000
2013	69.000.000.000	70.993.714.000
2014	148.000.000.000	27.011.122.069
2015	238.801.147.682	50.074.066.580

Sumber: DPPKA Kabupaten Simalungun

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah perkembangan pendapatan daerah menunjukkan tren menaik setiap tahunnya terutama dari sektor DBH Propinsi, lalu apakah sektor DBH Propinsi dan BKP Propinsi berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh variabel DBH Propinsi dan BKP Propinsi terhadap variabel PDRB Kabupaten Simalungun dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Propinsi dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan verifikatif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ditujukan untuk memperoleh kejelasan tentang variabel - variabel yang dipilih. Sedangkan metode verifikatif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dengan unit analisis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Simalungun. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kabupaten Simalungun

Sejak awal abad ke - 20, nama 'Simalungun' digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah pemerintahan bawahan dari wilayah Keresidenan Sumatera Timur, yakni yang disebut *Simeloengoen en Karolanden*. Yang dimaksud dengan *Simeloengoen* (Simalungun) adalah Kerajaan Siantar, Kerajaan Tanoh Jawa, Kerajaan Panei, Kerajaan Dolog Silou, Kerajaan Raya, Kerajaan Purba dan Kerajaan Silimakuta, yang masing – masing menandatangani semacam perjanjian (dikenal sebagai *Korte Verklaring*, 'Perjanjian Pendek') dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904 (dan diperbaharui tahun 1907).

Hampir bersamaan dengan pembentukan wilayah pemerintahan *Simeloengoen en Karolanden* tadi, nama 'Simalungun' digunakan sebagai nama suku bagi penduduk yang menghuni 7 Kerajaan-Kerajaan di *Simeloengoenlanden* tadi. Sebagai nama suku, sebutan 'Simalungun' digunakan untuk keseluruhan penduduk 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, walaupun sebutan 'Simalungun' jarang digunakan penduduk (dan pemerintahan) masing-masing Kerajaan, karena mereka tetap membedakan penduduknya dengan sebutan dalam bahasa Simalungun, yakni dengan menggunakan kata *sin* atau *par*, misalnya *sin* Raya, *sini* Panei, *sini* Purba, *par* Siantar.

Sejak masa itu pulalah nama Simalungun sering digunakan sebagai nama suku. Tetapi tidak hanya untuk penduduk 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, tetapi semua penduduk Sumatera Utara yang mempunyai budaya yang sama dengan budaya penduduk yang ada di 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, yang tersebar di Deli Serdang (dan Bedagai), di Asahan, di Dairi, di Karo.

Bersamaan dengan digunakannya sebutan 'Simalungun' sebagai nama suku, sebutan yang digunakan sebelumnya, yakni 'Batak Timur', atau '*Timoerlanden*', semakin jarang digunakan.

Satu suku bangsa dibedakan dari suku bangsa lainnya karena adanya perbedaan budaya. Saya sering mengatakan kepada sesama Simalungun, *budaya do palegankon Simalungun humbani suku bangsa na legan*. Simalungun akan tetap ada dan eksis (walaupun populasinya tidak banyak) jika halak Simalungun mempertahankan budaya yang membedakannya dari suku bangsa lain. Sebaliknya, jika tidak mau lagi mempertahankan budaya yang membedakannya dengan suku lain, dan lebih suka 'menyesuaikan' diri dengan budaya suku lain, halak Simalungun akan menghilang dari muka bumi ini.

Dulu, penduduk *halak* Simalungun yang menundukkan diri ke budaya suku Melayu, diberi julukan *domma salih gabe malayu*. Baik karena memeluk agama Islam, atau karena pindah ke wilayah yang penduduknya *halak* Melayu, atau karena *manundalhon arihan* (yakni yang bermakna membelot dari Kerajaan yang ada di sukunya, untuk kemudian menundukkan diri kepada penguasa wilayah di luar Simalungun). Ada juga yang *salih* jadi Karo, biasanya karena tinggal di wilayah yang berpenduduk Karo.

Sebaliknya, *halak* Toba (dan atau *par* Samosir) banyak yang *salih* jadi Simalungun. Konon, menurut TBA Purba Tambak (almarhum), sejak awal berdirinya Harajaon Dolog Silou, sudah ada marga Simarmata dan marga Sipayung di Dolog Silou, dan tidak ada marga Sinaga. Mereka itu sudah *salih* menjadi Simalungun. Proses *salih* terjadi karena seseorang meninggalkan budaya asalnya dan menjadikan budaya setempat menjadi budayanya. Jadi, dalam pengertian *budaya do palegankon suku bangsa*, Simalungun akan tetap eksis sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia (dan dunia) sepanjang masih ada yang

memelihara budayanya, yakni yang disebut budaya Simalungun, sepanjang masih ada yang mau menjadi *halak* Simalungun (dalam arti berbudaya Simalungun).

Seperti sudah dikemukakan tadi, sejak awal abad ke-20 sebutan Simalungun semakin sering digunakan kepada satu suku bangsa yang tinggal di 7 Kerajaan di wilayah *Simeloengoenlanden* dan wilayah-wilayah sekitarnya (yang kemudian dimasukkan menjadi wilayah pemerintahan yang bertetangga dengan 7 Kerajaan tadi (yang kini menjadi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo). Sebelumnya, lebih sering digunakan nama kewarganegaraan penduduk, seperti *sini* Panei (untuk rakyat Kerajaan Panei), *par* Sordang (sebutan untuk rakyat Kesultanan Serdang). Sementara ‘orang luar’ yang datang berkunjung atau meleliti ke wilayah yang dihuni *halak* Simalungun, lebih suka menggunakan sebutan Batak Timur, mungkin karena berdiam di wilayah sebelah Timur rumpun-suku Batak lainnya.

Di kalangan penulis *halak* Simalungun, masih banyak yang berpendapat bahwa sebelum Belanda melebarkan sayap penjajahannya ke wilayah berpenduduk Simalungun (dan menemukan fakta adanya 7 Kerajaan), terdapat 4 Kerajaan di Simalungun, yang disebut *Raja Maroppat*, yakni Silou, Panei, Siantar dan Tanoh Jawa. Bahkan ada yang yakin bahwa sebutan *Raja Maroppat* adalah konsep Simalungun. Sudah pernah saya kemukakan bahwa sebutan *Raja Maroppat* berasal dari konsep *tuha peuet*-nya Kesultanan Aceh saat meluaskan pengaruhnya ke kawasan Sumatera Timur. Namun pendapat tadi tidak berubah. Ada pula yang berpendapat, sebelum ada *Raja Maroppat*, hanya ada satu Kerajaan, yakni Kerajaan Silou.

Tetapi dalam satu hal. sepertinya semuanya sepakat, yakni tadinya hanya satu Kerajaan, yakni Kerajaan Nagur. Jika kelak dapat diterima sebagai kebenaran sejarah bahwa rakyat Nagurlah yang mewariskan kebudayaan yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan kebudayaan Simalungun, maka hal itu berarti kebudayaan Simalungun sudah teruji di wilayah ini selama lebih kurang 14 abad, karena konon Nagur sudah tercantum dalam naskah Cina dari abad ke-6, masih eksis dan dicatat oleh Marco Polo (abad ke-13) dengan nama ‘Nagore’ atau ‘Nakur’, masih eksis pada saat Pinto mencatat (abad ke-16) bahwa Nagur meminta bantuan Portugis yang berkedudukan di Malaka karena mendapat serangan dari Aceh, dan bahwa Encyclopedi Ned. Indie mencatat Nagur dapat bertahan dari invasi Johor dan Siak. Ketika pada penghujung abad ke-19 Belanda menginjakkan kakinya ke wilayah yang dihuni penduduk pewaris kebudayaan rakyat Nagur tadi, masih ditemuinya kebudayaan yang sama di 7 Kerajaan yang di kemudian hari disebutnya sebagai kawasan *Simeloengoen*, bahkan sama dengan kebudayaan sebagian rakyat yang tersebar di sekeliling *Simeloengoen*.

PEMBAHASAN

Dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana, dibentuk fungsi persamaan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi terhadap PDRB. Seluruh variabel tersebut secara serentak dimasukkan kedalam persamaan regresi linear sederhana, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8360,310	718,518		11,635	,000

DBH	3,032	,000	,749	4,414	,003
BKP	2,203	,000	,385	2,267	,058

Sumber: Data diolah, 2016

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda dimana Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan X_1 dan Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) merupakan X_2 dengan rumusan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + c$$

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8360,31 + 3,032 X_1 + 2,203X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta $a = 8360,31$ menunjukkan pengaruh positif variabel independen (DBH dan BKP). Bila variabel independen naik maka variabel dependen PDRB akan naik pula.
- $b_1 = 3,032$ berarti bahwa jika variabel X_2 (BKP) bernilai 0 (nol) maka pertambahan satu satuan X_1 (DBH) mampu memberikan pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Simalungun sebesar 3,032 rupiah.
- $b_2 = 2,203$ berarti bahwa jika variabel X_1 (DBH) bernilai 0 (nol) maka pertambahan satu satuan X_2 (BKP) mampu memberikan pengaruh positif terhadap Y (PDRB Kabupaten Simalungun) sebesar 2,203 rupiah.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa & Ashari, 2005). Dalam bahasa sehari - hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase.

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,804	,748	1437,83141

Hasil pengujian koefisien determinasi tersebut menunjukkan nilai $R^2 = 0,804$ hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen DBH dan BKP mampu menjelaskan PDRB Kabupaten Simalungun sebesar 80,4% sedangkan sisanya 19,9% lagi tidak disertakan dalam model persamaan estimasi.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa distribusi belanja yang bersumber dari penerimaan Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Propinsi pada APBD Kabupaten Simalungun memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Setiap belanja daerah yang digunakan untuk masing - masing sektor sudah mampu merangsang PDRB Kabupaten Simalungun menjadi semakin meningkat.

Uji F (uji serempak)

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji serempak (uji statistik F) untuk melihat signifikansi secara simultan variabel terikat terhadap variabel bebas.

Tingkat kepercayaan pada penelitian ini adalah 95% dan level pengujian yang digunakan adalah α (alpha) = 5%. Apabila nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini berarti bahwa variabel – variabel bebasnya secara bersama – sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa variabel – variabel bebasnya secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	59365830,701	2	29682915,350	14,358	,003 ^b
Residual	14471514,199	7	2067359,171		
Total	73837344,900	9			

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan data pada tabel uji F diatas, diperoleh F_{hitung} 14,358 dimana F_{tabel} adalah 4,74, maka dipastikan F_{hitung} (14,358) > F_{tabel} (4,74). Artinya, variabel independen X_1 dan X_2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi secara bersama - sama berpengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun.

Uji t (Uji Parsial)

Tingkat kepercayaan pada penelitian ini adalah 95% dan level pengujian yang digunakan adalah α (alpha) = 5 %. Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka hipotesa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu pula, dapat untuk menilai pengaruh signifikan secara parsial dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi dengan kriteria: jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan data dapat diketahui hasil uji t (uji parsial) variabel independen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) terhadap variabel dependen PDRB. Nilai signifikansi untuk DBH adalah 0,03 lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya nilai signifikansi untuk variabel independen BKP adalah 0,058 lebih besar dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan variabel independen BKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah diarahkan untuk dua tujuan utama, yaitu: (i) menjalankan mesin birokrasi atau roda pemerintahan dan (ii) merangsang atau menggerakkan kegiatan ekonomi secara umum. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Diperlukan pergeseran komposisi belanja yang digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya

mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional.

Pengaruh DBH dan BKP Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun

Secara umum segala penerimaan yang ada pada pos APBD Kabupaten Simalungun merupakan modal untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan yang ada. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pembangunan, maka akan mampu menggerakkan dan mendongkrak roda pemerintahan dan roda ekonomi Kabupaten Simalungun.

Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi yang juga merupakan sektor penerimaan yang cukup potensial bagi Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan pembangunannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Propinsi ternyata belum signifikan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan uji F (simultan) yang dilakukan, diperoleh $F_{hitung} (14,358) > F_{tabel} (4,74)$. Artinya, variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa DBH dan BKP Propinsi secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun

Dana Bagi Hasil Propinsi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Simalungun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada dasarnya Dana Bagi Hasil Propinsi yang diberikan kepada Kabupaten Simalungun merupakan pendapatan Propinsi Sumatera Utara yang sumber penerimaannya berasal dari wilayah Kabupaten Simalungun yang didistribusikan kembali ke daerah asal dengan persentase tertentu. Komponen penerimaan Dana Bagi Hasil terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor sejumlah Rp. 138.673.189.363,- yang berasal dari masyarakat Kabupaten Simalungun yang memiliki kendaraan bermotor dan telah membayarkan pajak tahunan kendaraannya tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2014 sejumlah 830.986, sehingga kontribusi rata - rata penerimaan pajak kendaraan bermotor ada sejumlah Rp. 166.878,- per penduduk Kabupaten Simalungun. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar mengingat pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Simalungun berada pada kisaran Rp. 1.460.505,- per bulan.

Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh Dana Bagi Hasil Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun diperoleh nilai signifikansi DBH adalah 0,03 lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

Pengaruh Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun

Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara merupakan program dan kegiatan pemerintah propinsi yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Simalungun yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten untuk memudahkan pemerintah propinsi karena keterbatasannya.

Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi di Kabupaten Simalungun tergolong fluktuatif. Kondisi tersebut disesuaikan dengan posisi APBD Propinsi Sumatera Utara setiap

tahunnya. Hal ini dapat dilihat dimana pada tahun 2012 penerimaan BKP dari Propinsi meningkat drastis dari tahun 2011 hingga 1000 %, sementara itu tahun 2013 kembali turun, dan demikian seterusnya.

Dapat diketahui bahwa Dinas Bina Marga dan Dinas Tarukim merupakan instansi pengelola BKP terbesar di Kabupaten Simalungun. Prioritas penggunaan dana BKP ini diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar yang perlu penanganan serius dan strategis terhadap kebutuhan masyarakat seperti jalan dan jembatan.

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu uji t (uji parsial) variabel independen BKP terhadap variabel dependen PDRB, sesuai dengan data pada diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen BKP adalah 0,058 lebih besar dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan variabel independen BKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan secara umum sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dan Bantuan Keuangan (BKP) Provinsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun dari hasil uji F (simultan) yang dilakukan, diperoleh $F_{hitung} (14,358) > F_{tabel} (4,74)$. Artinya, variabel independen X_1 dan X_2 secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa DBH dan BKP Propinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Simalungun.
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Nilai signifikansi DBH adalah 0,03 lebih kecil dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Sedangkan Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) Provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun. Nilai signifikansi untuk variabel independen BKP adalah 0,058 lebih besar dari nilai signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka dapat disimpulkan variabel independen BKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2004. *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. 2008. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD*.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2015. *Simalungun Dalam Angka Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik: Kabupaten Simalungun.

-
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten / Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.334>
- Lucky Satria Pratama, Darwin Damanik, & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 52 –. Retrieved from <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilnomi/article/view/120>
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Tarigan, R. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang. 1999. *Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

**PENGARUH KEPEMIMPINAN, PELATIHAN, DAN BUDAYA ORGANISASI
TERHADAP PENINGKATAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PERSERIKATAN
MUHAMMADIYAH DI TEBING TINGGI**

Siti Ainun¹, Dearlina Sinaga², Hisarma Saragih³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi anggota perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti penelitian kuantitatif menggunakan instrumen – instrumen formal, standar dan bersifat mengukur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi dan jumlah sampel ditentukan sebanyak 125 orang yaitu jumlah indikator x 5. Data dikumpulkan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi dan variabel - variabel yang diteliti menggunakan skala likert. Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas, pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20.0, dan dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menunjukkan beberapa hal yaitu: secara serempak kepemimpinan, pelatihan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi anggota perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi, secara parsial kepemimpinan dan budaya organisasi sama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi anggota perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi, sementara pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi anggota perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Pelatihan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi

ABSTRACT

This study aims to determine and examine the influence of leadership, training, and organizational culture on the organizational commitment of members of the Tebing Tinggi Muhammadiyah Association, either partially or simultaneously. This type of research is descriptive quantitative, descriptive research is a method of researching the status of human groups, an object, a set of conditions, a system of thought, or a class of events in the present that aims to make descriptions, drawings, or drawings systematically, factually and accurately regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated. Quantitative research takes the distance between the researcher and the object under study. Quantitative research uses formal, standard and measuring instruments. The population in this study were all members of the Tebing Tinggi Muhammadiyah Association and the number of samples was determined as many as 125 people, namely the number of indicators x 5. Data were collected by interviews, questionnaires and documentation studies and the variables studied used a Likert scale. The list of questions was first tested using validity and reliability testing, data processing using SPSS software version 20.0, and analyzed using multiple linear regression analysis. Hypothesis testing shows several things, namely: simultaneously leadership, training and organizational culture have a positive and significant effect

on the organizational commitment of members of the Tebing Tinggi Muhammadiyah association, partially leadership and organizational culture both have a positive and significant effect on the organizational commitment of members of the Tebing Tinggi Muhammadiyah association, while training has no significant effect on the organizational commitment of members of the Tebing Tinggi Muhammadiyah association.

Keyword : Leadership, Training, Organizational Culture, Organizational Commitment

PENDAHULUAN

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan - tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dari setiap anggota organisasi sangat diharapkan setiap organisasi, karena dengan komitmen yang tinggi dari setiap anggota organisasi akan dapat membantu terciptanya tujuan sebuah organisasi.

Kepemimpinan yang merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerjasama untuk mencapai tujuan, untuk itu dalam setiap organisasi kepemimpinan yang baik dan efektif sangat diharapkan untuk dapat mencapai tujuan organisasi dalam hal ini termasuk dalam upaya meningkatkan komitmen organisasi, kepemimpinan yang baik akan mendorong/mempengaruhi anggota organisasi dengan kemampuan dan wewenang yang dimilikinya agar anggota organisasi memiliki komitmen organisasi yang baik.

Setiap organisasi mengharapkan sebuah pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan anggota organisasi, dan organisasi juga mengharapkan agar pelatihan yang diikuti oleh anggota organisasi mampu meningkatkan komitmen organisasi setiap anggota, namun demikian pada kenyataannya masih banyak anggota organisasi yang mengikuti berbagai pelatihan tanpa menganalisis dengan baik manfaat pelatihan terhadap organisasi maupun terhadap anggota organisasi secara individu, sehingga sering pelatihan yang diikuti oleh anggota organisasi tidak memberikan peningkatan terhadap komitmen organisasi hal inilah yang terjadi pada organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi.

Budaya organisasi yang baik dan yang kuat diharapkan oleh setiap organisasi karena dengan budaya organisasi yang kuat maka diharapkan akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya termasuk dalam tujuan meningkatkan komitmen organisasi, budaya organisasi yang belum kuat masih terlihat di organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi hal ini paling tidak ditunjukkan adanya berbagai ciri atau karakter yang dimiliki oleh para anggota organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi saat ini.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi terhadap peningkatan komitmen organisasi pada Perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, (Nazir, 2005) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti

penelitian kuantitatif menggunakan instrumen – instrumen formal, standar dan bersifat mengukur (Sukmadinata, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi

Muhammadiyah yang dipelopori KHA Dahlah berdiri di Yogyakarta bersinar keseluruh Nusantara dan sampai ke Sumatera Utara dan masuknya Muhammadiyah ke Tebing Tinggi (sekarang Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi) melalui pengajian dari rumah ke rumah pada tahun 1925 dan pengurusnya terbentuk secara resmi tahun 1927 di bawah pimpinan Penghulu Jewo. Kemudian pusat kegiatan pindah ke Tebing Tinggi Deli dan berdiri tanggal 1 Mei 1929 dipimpin mantan Penghulu Pokan H.Ibrahim Lubis. Perkembangan selanjutnya menyesuaikan dengan struktur Pemerintahan Tebing Tinggi dari Kotapraja menjadi Kotamadya yang sejalan pula dengan Keputusan Mukthamar Muhammadiyah Ke-36 Tahun 1965 di Bandung, memberi amanah untuk mengembangkan satuan organisasi dalam bentuk Wilayah dan Daerah disesuaikan dengan susunan pemerintahan, yakni : (1) Daerah adalah satuan Cabang dalam Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya (sekarang Kabupaten atau Kota), (2) Wilayah adalah satuan Daerah dalam tingkat I (Provinsi). Muhammadiyah Sumatera Utara yang semula terbagi dalam 2 (dua) Wilayah yaitu Muhammadiyah Sumatera Timur dan Muhammadiyah Tapanuli yang perkembangan selanjutnya dalam Musyawarah tanggal 31 Januari 1966 sepakat disatukan menjadi Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara.

Menindaklanjuti hasil keputusan 31 Januari 1966 diadakanlah Musyawarah tanggal 24-25 Nopember 1966 di Tebing Tinggi dengan susunan pengurus sementara ketua dijabat A.R.St.Tumanggung dengan persiapan ada 7 Cabang dilanjutkan pembentukan Ranting. Sejak itulah Cabang Muhammadiyah Tebing Tinggi beralih resmi menjadi Muhammadiyah Daerah Kotamadya Tebing Tinggi terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1966 yang kemudian memperoleh pengesahan berdirinya Daerah Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi tanggal 15 April 1971 yang luas lingkungannya meliputi seluruh daerah Kota Tebing Tinggi sesuai SK PP Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : B-121 / D – 4 / 71 tanggal 15 April 1971 yang diperbaharui dengan SK PP Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 246 / KEP / I.O/ V / 2012 tanggal 04 Dzulhijah 1433 H/20 Oktober 2012 M sebagai pengganti SK sebelumnya yang tidak dapat ditemukan dan dinyatakan hilang. Muhammadiyah Daerah Kota Tebing Tinggi terus menjalani dinamikanya dari Musyda ke Musyda. Musyda Ke-1: Periode 1968-1969, Ke-2: 1969 - 1971, Ke-3: 1971 - 1974, Ke-4: 1974 - 1978 berturut turut dipimpin A.R.St.Tumanggung, Musyda Ke-5: 1978-1985 (Djohan Effendi), Musyda Ke-6: 1985-1990 (Drs.Hasan Basri Harahap kemudian pergantian antar waktu oleh Anas Kari Sutan), Musyda Ke-7: 1990-1995 (H.Saidi Nasution, BA), Musyda Ke-8: 1995-2000 (H.Djohan Effendi) Musyda Ke-9: 2000-2005 (Drs.Jamhur, SH kemudian PAW digantikan oleh Abu Hasyim Siregar, SH), Musyda Ke-10: 2005-2010 (Abu Hasyim Siregar, SH) dan Musyda Ke-11 2010-2015 dipimpin Ali Hasan Lubis, S.Pd.

Visi Misi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi

Visi Ideal Muhammadiyah “Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Misi Ideal Muhammadiyah :

- a. Menegakkan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- b. Menyebarluaskan dan memajukan Ajaran Islam yang bersumber pada Al- Qur'an dan As-Sunnah yang shahihah/maqbulah.
- c. Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Data Keanggotaan Perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi.

No	Jenis Keanggotaan	Jenis kelamin (orang)		Jumlah (Orang)
		Lk	Pr	
1	Terdaftar	350	250	600
2	Partisipan	200	100	300

ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif, menunjukkan nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), rata - rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti untuk hipotesis, baik itu variabel bebas yaitu kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi serta variabel terikat yaitu komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Analisis Deskripsi Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemimpinan	125	24	49	37,27	6,494
Pelatihan	125	18	35	27,03	3,976
Budaya Organisasi	125	19	35	26,62	3,537
Komitmen Organisasi	125	17	33	23,60	3,420
Valid N (listwise)	125				

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa rata - rata variabel X_1 (kepemimpinan) sebesar 37,27 nilai tertinggi sebesar 49 dan nilai terendah sebesar 24, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 6,494. Rata - rata variabel X_2 (pelatihan) sebesar 27,03 nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 18 sedangkan standar deviasinya sebesar 3,976. Rata - rata variabel X_3 (budaya organisasi) sebesar 26,62 nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 19 sedangkan standar deviasinya sebesar 3,537. Rata - rata variabel Y (Komitmen organisasi) sebesar 23,60 nilai tertinggi sebesar 33 dan nilai terendah sebesar 17 sedangkan standar deviasinya adalah 3,420.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu variasi variabel bebas yaitu kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi dalam menerangkan variasi variabel terikatnya yaitu komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi. Nilai koefisien determinasi R^2 dapat dilihat dalam Tabel 2

Tabel 2. Koefisien Determinan (Uji R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,539 ^a	,291	,273	2,916	2,071

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,291 atau 29,1% yang menunjukkan kemampuan variabel kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Komitmen organisasi adalah sebesar 29,1%, sedangkan sisanya

sebesar 70,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya iklim organisasi, kepuasan kerja, motivasi dan lain - lain.

Nilai R^2 yang kecil dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas (*independent variable*) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (*dependent variable*) sangat terbatas. Menurut (Ghozali, 2005) menyatakan bahwa secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing - masing pengamatan.

Uji Serempak (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan Tabel 3 di bawah ini dapat diketahui bahwa $F_{hitung} = 16,524$ dan $F_{tabel} = 2,68$ dalam hal ini F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikan adalah 0.000 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, sehingga keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan variabel bebas kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi mampu menjelaskan keragaman dari variabel terikat yaitu Komitmen organisasi Perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi (Y) maka dalam hal ini variabel kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi Perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi.

Tabel 3. Uji Serempak (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	421,411	3	140,470	16,524	,000 ^b
Residual	1028,589	121	8,501		
Total	1450,000	124			

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dilakukan dua arah, menggunakan tingkat signifikansi alpha 2,5 % . Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan kriteria keputusan adalah:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima atau H_1 ditolak

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak atau H_1 diterima

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 6,415 dan nilai koefisien masing-masing variabel adalah sebesar 0.166 untuk X_1 , 0,078 untuk X_2 dan sebesar 0,334 untuk X_3 . Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,415 + 0.166 X_1 + 0,078X_2 + 0,334X_3$$

Dimana :

Y = Komitmen organisasi

X_1 = Kepemimpinan

X_2 = Pelatihan

X_3 = Budaya organisasi

Tabel 4. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,415	2,647		2,423	,017
Kepemimpinan	,166	,041	,315	4,020	,000

Pelatihan	,078	,068	,091	1,155	,250
Budaya Organisasi	,334	,078	,346	4,304	,000

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 4 di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} untuk variabel kepemimpinan (4,020) lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} (3,18) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel kepemimpinan. Dengan demikian maka secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi, dengan kata lain kepemimpinan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan terhadap komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi.
2. Nilai t_{hitung} untuk variabel pelatihan (1,155) lebih kecil dibandingkan dengan t_{tabel} (3,18) atau nilai sig (1,155) lebih besar dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 diterima dan H_1 ditolak untuk variabel pelatihan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa secara parsial pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi, atau dengan kata lain bahwa pelatihan yang diikuti oleh anggota Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi memiliki kurang memberi dampak dalam meningkatkan komitmen anggota Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi.
3. Nilai t_{hitung} untuk variabel budaya organisasi (4.304) lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (3,18) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel budaya organisasi, maka secara parsial budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi atau dengan kata lain bahwa budaya organisasi memiliki peran yang kuat dalam meningkatkan komitmen organisasi para anggota Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi. Budaya organisasi yang kuat di Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi dapat menumbuhkan komitmen organisasi yang kuat bagi para anggota Perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan

Dari hasil analisis data yang diperoleh bahwa pengaruh variabel kepemimpinan terhadap peningkatan komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi adalah signifikan positif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi Muhammadiyah sangat berpengaruh karena pada kenyataan dilapangan para anggota perserikatan Muhammadiyah selalu tunduk / patuh terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin perserikatan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Misalnya tentang penentuan awal puasa, awal 1 Syawal ataupun 10 Zulhidjah yang sangat umum kita ketahui selalu para anggota perserikatan tetap melaksanakan walaupun pemerintah belum menentukan tetapi jika telah ditetapkan oleh ketua perserikatan maka seluruh anggota perserikatan yang ada di Indonesia tetap melaksanakan. Hal ini bahwa hakekat kepemimpinan sebenarnya terletak dari cara bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi bawahannya dalam mencapai suatu tujuan.

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung kepada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan, bahkan kiranya dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan terutama terlihat dalam kinerja pegawainya (Siagian, 2001)

Terdapat sebelas ciri kepemimpinan dalam perubahan terencana yang dikemukakan oleh Sheila Murray (dalam Hamzah, 2008) sebagai berikut :

1. Punya misi yang penting
2. Seorang pemikir yang besar
3. Seorang pemimpin mempunyai ciri seorang master pengubah yang menciptakan masa depan, yaitu mengantisipasi kebutuhan dan perubahan produktif yang memimpin.
4. Memiliki ciri bersifat peka terhadap masalah yang dihadapi sehari-hari
5. Pemimpin mengambil resiko
6. Seorang pemimpin adalah seorang pengambil keputusan
7. Seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya secara bijaksana
8. Seorang pemimpin berkomunikasi efektif
9. Seorang pemimpin adalah pembangun tim
10. Pemimpin bersifat berani
11. Seorang pemimpin mempunyai komitmen.

Untuk lebih meningkatkan peranan kepemimpinan dalam organisasi Muhammadiyah di Tebing Tinggi tersebut perlulah seorang pemimpin memiliki sikap sosial yang tinggi, transparansi, bisa dijadikan panutan, bijak dalam mengambil keputusan, memiliki sifat motivator bagi para anggotanya.

Pelatihan.

Dalam bidang pelatihan ternyata, pelatihan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi, hal ini disebabkan karena dalam kegiatan pelatihan yang diadakan dalam perserikatan kurang tepat sasaran disebabkan pada kegiatan pemberian latihan waktu pelaksanaan sangatlah singkat sehingga para anggotanya terkadang kurang dapat memahami tujuan dari kegiatan pelatihan yang dilakukan.

Jika kita cermati pendapat dari (Mathis, 2002) mengemukakan bahwa “Pelatihan adalah suatu proses dimana orang - orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit dan luas“.

Pendapat dari (Amstrong, 2000) mengemukakan pendapatnya bahwa “Pelatihan adalah konsep terencana yang terintegrasi, yang cermat, yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan“.

Kemudian kita amati tujuan atau sasaran dari pelatihan pada dasarnya dapat dikembangkan dari serangkaian pertanyaan sebagai berikut:

1. Keefektifan/validitas Pelatihan.

Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan selama pelatihan.

2. Keefektifan pengalihan/transfer ilmu pengetahuan.

Apakah pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang dipelajari dalam pelatihan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas.

3. Keefektifan / validitas intraorganisasional.

Apakah kinerja pekerjaan dari grup baru yang menjalani program pelatihan di perusahaan sama dapat dibandingkan dengan kinerja pekerjaan dari grup sebelumnya.

4. Keefektifan / validitas interorganisasional.

Dapatkah suatu program pelatihan yang diterapkan di suatu perusahaan berhasil di perusahaan lain.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang - orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud disini adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan dan perubahan sikap dan perilaku. Tetapi pada kenyataan yang kita temukan dilapangan ternyata pelatihan yang dilakukan dalam perserikatan Muhammadiyah tidaklah memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah

Sehingga diharapkan kedepan dalam pemberian pelatihan haruslah dipertimbangkan secara detil tentang waktu, materi yang diberikan sesuai dengan kondisi peserta pelatihan sehingga kegiatan pelatihan tidaklah sia - sia agar dapat meningkatkan komitmen perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi

Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi .Hal ini tanpa jelas bahwa dalam budaya diperserikatan Muhammadiyah bersifat kolegial artinya dalam melaksanakan kepemimpinan dilakukan secara bersama - sama tidak bersifat individu untuk memutuskan suatu masalah. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan saran - saran yang dirangkul oleh pemimpin perserikatan Muhammadiyah di Tebing Tinggi

Hal ini sesuai dengan pengertian dari budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota organisasi yang berisi nilai - nilai, norma norma dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan dalam bekerja sehari-hari. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai - nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota - anggotanya.

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai - nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota - anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal (Mangkunegara, 2005). Budaya organisasional adalah sistem makna, nilai - nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain (Mas'ud, 2004). Budaya organisasi selanjutnya menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan dipertahankan (Mas'ud, 2004). Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan.

Fungsi budaya organisasi sebagai pedoman kontrol dalam membentuk sikap dan perilaku karyawan dalam menyelesaikan masalah - masalah organisasi melalui nilai - nilai dan norma yang dianut untuk lebih berinovasi. Budaya organisasi dapat pula berfungsi sebagai kontrol atas sikap dan perilaku anggota - anggota organisasi dalam mencapai tujuan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi budaya organisasi diantaranya adalah:

- a. Komunikasi
- b. Motivasi
- c. Karakteristik Organisasi
- d. Proses-proses Administrasi
- e. Struktur Organisasi
- f. Gaya Manajemen

Ada beberapa karakteristik atau indikator budaya organisasi seperti pendapat dari Luthas dalam (Sopiah, 2008) mengemukakan karakteristik atau dimensi budaya organisasi, yang meliputi:

1. Aturan - aturan perilaku, yaitu bahasa, terminologi dan ritual yang biasa dipergunakan oleh anggota organisasi,
2. Norma, merupakan standar perilaku yang meliputi petunjuk bagaimana melakukan sesuatu yang dikenal luas sebagai norma agama, norma sosial, norma susila, norma adat dan lain-lain.
3. Nilai - nilai dominan, adalah nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk dikerjakan oleh para anggota, misalnya tingginya kualitas produk, rendahnya tingkat absensi, tingginya produktivitas dan efisiensi.
4. Filosofi, adalah kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal - hal yang disukai oleh pegawai dan pelanggan,
5. Peraturan - peraturan, Aturan yang tegas dari organisasi pegawai baru harus mempelajari peraturan ini agar keberadaannya dapat diterima dalam organisasi,
6. Iklim organisasi, adalah keseluruhan perasaan yang meliputi hal - hal fisik, bagaimana para anggota organisasi mengendalikan diri dalam berhubungan dengan pelanggan atau pihak luar organisasi.

Budaya organisasi dapat dijadikan semacam fondasi bagi organisasi agar dapat terus berdiri dan bertahan. Sebagaimana layaknya sebuah bangunan, maka fondasi yang kuat dan sesuai dengan lingkungan tempatnya berdiri, akan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Demikian pula dengan organisasi, dengan nilai-nilai yang kuat dan diterima oleh lingkungan, maka organisasi tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat terus berdiri dan memproduksi lebih baik.

Komitmen Organisasi

Konsep Komitmen muncul dari studi yang mengeksplorasi kaitan atau hubungan antara pegawai dengan organisasi. Dorongan untuk melakukan studi tentang komitmen didasari suatu keyakinan bahwa karyawan yang berkomitmen akan menguntungkan bagi organisasi, karena kemampuan potensialnya untuk mengurangi turnover dan meningkatkan kinerja (Mowday dalam (Zellars et al., 2001)

(Robbins & Judge, 2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan - tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Mathis dan Jackson dalam (Sopiah, 2008)

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan - tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya

Variasi definisi dan ukuran komitmen organisasi sangat luas. Sebagai sikap, komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan (Luthan, 2006).

Ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan. Berikut ini adalah ketiga faktor tersebut.

- a. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan.
- b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja.
- c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara pekerja - pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi, yang ditandai dengan nilai t_{hitung} variabel kepemimpinan (4,020) yang lebih besar t_{tabel} (3,18) atau nilai sig (0,000) yang lebih kecil dari alpha (0,025).
2. Secara parsial variable pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi, yang ditandai dengan nilai t_{hitung} pelatihan (1,155) yang lebih kecil dari t_{tabel} (3,18) dan juga nilai sig (0,250) yang lebih besar dari alpha (0,025).
3. Secara parsial variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan muhammadiyah Tebing Tinggi, yang ditandai dengan nilai t_{hitung} variable budaya organisasi (4,304) yang lebih besar dari t_{tabel} (3,18) atau nilai sig (0,000) yang lebih kecil dari alpha (0,025).
4. Secara simultan variabel kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi perserikatan Muhammadiyah Tebing Tinggi, yang ditandai dengan nilai F_{hitung} (16,524) yang lebih besar dari nilai F_{tabel} (2,68) dan nilai signifikan adalah 0.00 yang lebih kecil dari nilai alpha 0.05
5. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,291 atau 29,1% yang menunjukkan kemampuan variabel kepemimpinan, pelatihan, dan budaya organisasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Komitmen organisasi adalah sebesar 29,1 %, sedangkan sisanya sebesar 70,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya iklim organisasi, kepuasan kerja, motivasi dan lain - lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, E. I. K., & Saragih, M. (2019). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1>
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mas'ud, 2004, *Survey Diagnosis Organizational*, Undip, Semarang
- Maxwell, C. John. 2001. *The 21 Irrefutable Laws Of Leadership*, Terjemahan: Drs. Arvin Saputra, Batam: Interaksa
- Mondy, R. Wayne. (2010). *Human Resource Management*. 11th edition. Pearson Education. New Jersey
- Oemar Hamalik. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purba, H. E. D., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Ginting, M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Peningkatan Kinerja Di Kantor Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 13 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.576>
- Saragih, T. M., & Purba, D. syafe'i. (2019). Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Kantor Satpol PP Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.36985/accusi.v1i1>
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suherman, Eman, dkk. 2001. *Common Text Book; Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Bandung
- Tambunan, M., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Pengaruh Pelatihan, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Simalungun . *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 31 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.577>
- Tarigan, W. J., Girsang, R. M., & Martina, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Non Fisik Terhadap Produktivitas Karyawan PT Astra Honda Pematangsiantar. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3), 363-371
- Wahjosumidjo, 1999. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wibowo, 2010, *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers

**PEMBANGUNAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERTANIAN DAN
PEMBERIAN SUBSIDI PUPUK UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI PADI
(STUDI KASUS DI DESA SILAEN KABUPATEN TOBA SAMOSIR)**

Porman¹, Robert Tua Siregar², Marihot Manullang³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberian subsidi pupuk terhadap produksi padi di desa Silaen kabupaten Toba Samosir baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di desa Silaen kabupaten Toba Samosir, Sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan jumlah indikator penelitian yaitu 10 X jumlah indikator penelitian maka jumlahnya adalah 10 X 11 = 110 orang responden. Penerikan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling* dengan syarat masyarakat yang dipilih adalah petani padi dan yang sudah pernah membeli pupuk yang bersubsidi. Data dikumpulkan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi dan variabel - variabel yang diteliti menggunakan skala likert. Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas, pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20.0, dan dianalisis dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis jalur. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberian subsidi pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi di desa Silaen kabupaten Toba Samosir. Secara parsial baik rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberian subsidi pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi di desa Silaen kabupaten Toba Samosir.

Kata Kunci: Rehabilitasi Irigasi, Subsidi Pupuk, Produksi Padi

ABSTRACT

This study aims to determine and test the effect of rehabilitation of irrigation networks and provision of fertilizer subsidies on rice production in Silaen village, Toba Samosir district, both partially and simultaneously. This research is a descriptive research, namely the method of researching the status of human groups, a thought or a class of events in the present that aims to make a systematic, factual and accurate description, picture or painting of facts, characteristics and relationships between phenomena. Investigated, The population in this study were all farmers in Silaen village, Toba Samosir district. The sample in this study was determined based on the number of research indicators, namely 10 X the number of research indicators, so the number is 10 X 11 = 110 respondents. Sampling was carried out by accidental sampling with the condition that the people selected were rice farmers and those who had purchased subsidized fertilizer. Data were collected by interviews, questionnaires and documentation studies and the variables studied used a Likert scale. The list of questions was first tested using validity and reliability testing, data processing using SPSS software version 20.0, and analyzed with descriptive analysis and hypothesis testing with path analysis. The results of this research analysis indicate that simultaneously rehabilitation of irrigation networks and provision of fertilizer subsidies have a positive and significant effect on rice production in Silaen

village, Toba Samosir district. Partially, both the rehabilitation of irrigation networks and the provision of fertilizer subsidies had a positive and significant effect on rice production in Silaen village, Toba Samosir district

Keyword : Irrigation Rehabilitation, Fertilizer Subsidies, Rice Production

PENDAHULUAN

Produksi padi saat ini menjadi salah satu masalah yang sangat krusial untuk dipecahkan karena produksi padi akan menentukan kemampuan negara untuk mencapai ketahanan pangan nasional, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, maka peningkatan produksi padi nasional menjadi salah satu pekerjaan yang paling penting bagi pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Beras yang merupakan bahan makanan pokok saat ini dinegara ini juga diperkirakan akan menjadi bahan makanan pokok dalam jangka waktu yang masih sangat lama, maka dengan demikian kebutuhan beras nasional akan terus meningkat oleh adanya penambahan penduduk yang masih tinggi pertambahan penduduk Indonesia pertahun sekitar 4 – 5 juta jiwa, sehingga beberapa tahun kedepan jumlah penduduk Indonesia akan semakin banyak, dalam hal ini kebutuhan beras jangka menengah juga akan semakin tinggi begitu juga kebutuhan jangka panjang akan semakin tinggi. Pada saat ini di negara Indonesia ini rasio petani dengan jumlah penduduk sekitar 1 : 10 yang artinya hanya ada 10% dari penduduk Indonesia yang langsung memproduksi padi, seperti yang dikatakan, Sumarno, 2007, dari 220 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 10 persen penduduk yang secara langsung memproduksi beras 12,67 juta kk petani padi.

Pembangunan irigasi diberbagai daerah pertanian khususnya petani padi sudah dilakukan pemerintah namun masih sangat kurang dibandingkan dengan lahan yang ada dan juga dengan produksi padi pada jangka menengah, Menurut (Widoro, 2007) Pembangunan irigasi adalah keharusan yang tidak dapat ditolak bagi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan apapun ideologinya, karena kerusakan irigasi adalah lonceng kematian bagi kedaulatan pangan. Pendapat tersebut menunjukkan bagaimana vitalnya fungsi dari irigasi dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia termasuk irigasi untuk lahan pertanian padi.

Dalam rangka meningkatkan produksi padi pembangunan irigasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (Katumi *et al.*, 2002), dan (Bouman, 2003) yang mengemukakan bahwa produksi pertanian di masa mendatang akan terus dipengaruhi oleh anomali dan ketidakpastian iklim yang berdampak terhadap gejolak pasokan air, terjadinya kekeringan dan banjir, yang menjadi ancaman bagi usahatani. Oleh karena itu, upaya inovatif diperlukan untuk menyiapkan sistem irigasi dengan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian di masadepan. Walaupun banyak pendapat menjelaskan bagaimana pentingnya irigasi dalam meningkatkan produksi padi, namun kenyataanya di daerah kabupaten Toba Samosir khususnya desa Silaen irigasi pertanian masih jauh dari kata cukup pada saat ini, dimana masih banyak lahan pertanian yang kering dan sangat kesulitan memperoleh sumber air.

Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah beberapa tahun belakangan ini sangat diharapkan masyarakat terutama petani padi di berbagai daerah, karena dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah masyarakat petani akan terbantu dalam hal kemampuan dalam

membeli pupuk dan juga akan membantu memastikan ketersediaan pupuk diberbagai daerah, namun kenyataannya banyak petani yang tidak merasakan manfaat dari subsidi pupuk yang diberikan pemerintah, banyak daerah yang tidak kebagian pupuk bersubsidi dan masalah lain hal inilah yang terjadi diberberapa daerah di desa Silaen kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkanuraiantersebut, maka penulisakan melakukan penelitian tesis yang berjudul :“Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian dan Pemberian Subsidi Pupuk untuk Meningkatkan Produksi Padi (Studi Kasus Desa Silaen Kabupaten Toba Samosir)”

Produksi padi saat ini menjadi salah satu masalah yang sangat krusial untuk dipecahkan karena produksi padi akan menentukan kemampuan negara untuk mencapai ketahanan pangan nasional, karena sebagian besar masyarakat indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, maka peningkatan produksi padi nasional menjadi salah satu pekerjaan yang paling penting bagi pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Beras yang merupakan bahan makanan poko saat ini dinegara ini juga diperkirakan akan menjadi bahan makanan pokok dalam jangka waktu yang masih sangat lama, maka dengan demikian kebutuhan beras nasional akan terus meningkat oleh adanya penambahan penduduk yang masih tinggi pertambahan penduduk Indonesia pertahun sekitar 4 – 5 juta jiwa, sehingga beberapa tahun kedepan jumlah penduduk indonesia akan semakin banyak, dalam hal ini kebutuhan beras jangka menengah juga akan semakin tinggi begitu juga kebutuhan jangka panjang akan semakin tinggi. Pada saat ini di negara Indonesia ini rasio petani dengan jumlah penduduk sekitar 1 : 10 yang artinya hanya ada 10% dari penduduk indonesia yang langsung memproduksi padi, seperti yang dikatakan, Sumarno, 2007, dari 220 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 10 persen penduduk yang secara langsung memproduksi beras 12,67 juta kk petani padi.

Pembangunan irigasi diberbagai daerah pertanian khususnya petani padi sudah dilakukan pemerintah namun masih sangat kurang dibandingkan dengan lahan yang ada dan juga dengan produksi padi pada jangka menengah, Menurut (Widoro, 2007) Pembangunan irigasi adalah keharusan yang tidak dapat ditolak bagi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan apapun ideologinya, karena kerusakan irigasi adalah lonceng kematian bagi kedaulatan pangan. Pendapat tersebut menunjukkan bagaimana vitalnya fungsi dari irigasi dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia termasuk irigasi untuk lahan pertanian padi.

Dalam rangka meningkatkan produksi padi pembangunan irigasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (Katumi *et al.*, 2002), dan (Bouman, 2003) yang mengemukakan bahwa produksi pertanian di masa mendatang akan terus dipengaruhi oleh anomali dan ketidakpastian iklim yang berdampak terhadap gejala pasokan air, terjadinya kekeringan dan banjir, yang menjadi ancaman bagi usahatani. Oleh karena itu, upaya inovatif diperlukan untuk menyiapkan sistem irigasi dengan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian di masadepan. Walaupun banyak pendapat menjelaskan bagaimana pentingnya irigasi dalam meningkatkan produksi padi, namun kenyataannya di daerah kabupaten Toba Samosir khususnya desa Silaen irigasi pertanian masih jauh dari kata cukup pada saat ini, dimana masih banyak lahan pertanian yang kering dan sangat kesulitan memperoleh sumber air.

Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah beberapa tahun belakangan ini sangat diharapkan masyarakat terutama petani padi di berbagai daerah, karena dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah masyarakat petani akan terbantu dalam hal kemampuan dalam membeli pupuk dan juga akan membantu memastikan ketersediaan pupuk diberbagai daerah, namun kenyataannya banyak petani yang tidak merasakan manfaat dari subsidi pupuk yang diberikan pemerintah, banyak daerah yang tidak kebagian pupuk bersubsidi dan masalah lain hal inilah yang terjadi diberberapa daerah di desa Silaen kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul :“Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian dan Pemberian Subsidi Pupuk untuk Meningkatkan Produksi Padi (Studi Kasus Desa Silaen Kabupaten Toba Samosir)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berupa deskriptif kuantitatif, (Nazir, 2005) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti penelitian kuantitatif menggunakan instrumen – instrumen formal, standar dan bersifat mengukur (Sukmadinata, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara setelah menjalani waktu yang cukup lama dan melewati berbagai proses, pada akhirnya terwujud menjadi kabupaten baru dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba Samosir dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden Republik Indonesia sekaligus melantik Drs. Sahala Tampubolon selaku Penjabat Bupati Toba Samosir. Pada saat itu, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Drs. Parlindungan Simbolon.

Setelah Kabupaten Toba Samosir diresmikan diangkat Ketua DPRD Sementara adalah M.P. Situmorang, selanjutnya dilakukan pemilihan yang hasilnya adalah Ketua Drh. Unggul Siahaan dan Wakil Ketua M.A. Simanjuntak dan Wakil Ketua Drs. L.P. Sitanggang. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia, dengan hasil menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir, serta menetapkan pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir masa bhakti 1999 – 2004 yaitu : Ketua Ir. Bona Tua Sinaga dan Wakil Ketua masing – masing adalah Sabam Simanjuntak, Drs. Vespasianus Panjaitan dan Letkol W. Nainggolan. Pada tahun 2000 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir, dengan hasil pemilihan, menetapkan Drs. Sahala Tampubolon sebagai Bupati dan Maripul S. Manurung, SH., sebagai wakil Bupati Toba Samosir, masa bhakti 2000 – 2005, pelantikan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2000 di Balige.

Pada awal pembentukannya, kabupaten ini terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 5 (lima) kecamatan pembantu, 281 desa dan 19 kelurahan, dengan batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun Sebelah Timur : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara Sebelah Barat : Kabupaten Dairi

Seiring dengan perjalanan pemerintahan di kabupaten ini jumlah kecamatan mengalami perubahan secara bertahap. Pada awal tahun 2002 dibentuk 5 kecamatan baru yakni pendefinitifan 4 (empat) kecamatan pembantu mejadi 4 (empat) kecamatan defenitif dan pembentukan 1 (satu) kecamatan baru. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ajibata, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Uluan, Kecamatan Ronggur Ni Huta dan Pembentukan Kecamatan Borbor yang dimekarkan dari Kecamatan Habinsaran. Kondisi pemekaran kecamatan berlanjut hingga pada akhir tahun 2002, dimana adanya aspirasi masyarakat yang cukup kuat dalam menyuarakan pemekaran Kecamatan Harian menjadi 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio sebagai kecamatan pemekaran baru.

Kuatnya aspirasi pembentukan kecamatan ini disikapi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir karena didukung fakta – fakta permasalahan di masyarakat baik kondisi geografis wilayah dan lain sebagainya, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menetapkan Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Pembentukan Kecamatan Sitiotio mendahului Peraturan Daerah, setelah mendapatkan izin prinsip dari DPRD Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2002. Keputusan Bupati ini dikuatkan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Sitiotio di Kabupaten Toba Samosir.

Sejalan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir, Bapak Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si., untuk melaksanakan Visi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang memiliki rasa Kasih, Peduli, dan Bermartabat” sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 – 2016.

HASIL PENELITIAN

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan variabel Rehabilitasi Irigasi (X₁) adalah seperti pada Tabel 1 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 1. Penjelasan Responden atas Variabel Rehabilitasi Irigasi

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Jumlah irigasi di desa kami cukup untuk mengairi lahan padi di desa	0	0,00	10	9,09	34	30,91	38	34,55	28	25,45
Desa kami ini memiliki banyak irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh petani	0	0,00	8	7,27	29	26,36	38	34,55	35	31,82
Aliran irigasi yang ada didesa kami saat ini cukup panjang	0	0,00	10	9,09	33	30,00	40	36,36	27	24,55
Irigasi didesa kami mampu mengairi lahan pertanian yang cukup luas didesa kami.	2	1,82	8	7,27	29	26,36	32	29,09	39	35,45

Debit air yang ada di irigasi didesa kami cukup banyak.	3	2,73	13	11,82	35	31,82	30	27,27	29	26,36
Pemerintah melalui perngkat kecamatan selalu aktif memantau irigasi yang ada didesa kami	1	0,91	12	10,91	40	36,36	30	27,27	27	24,55
Masyarakat didesa ini secara aktif memelihara saluran irigasi yang ada.	1	0,91	9	8,18	27	24,55	40	36,36	33	30,00

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Tabel diatas hasil jawaban responden yang disajikan pada tabel diatas mengenai rehabilitasi irigasi menunjukkan bahwa pilihan jawaban yang paling banyak dipilih responden adalah pilihan setuju dan selanjutnya kurang setuju, dan pilihan sangat setuju juga cukup banyak dipilih oleh responden hal ini menjelaskan bahwa keberadaan irigasi di desa Silaen kabupaten Toba Samosir cukup baik mulai dari jumlah irigasi, debit air di irigasi yang ada di desa silaen sampai dengan perbaikan irigasi.

Penjelasan Responden Atas Variabel Subsidi pupuk

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel subsidi pupuk (X_1) adalah seperti pada Tabel 2 yang disajikan kedalam distribusi frekuensi.

Tabel 2. Penjelasan Responden atas Variabel Subsidi pupuk

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Harga pupuk didaerah kami sudah terjangkau	0	0,00	3	2,73	31	28,18	38	34,55	38	34,55
Harga pupuk didaerah kami tidak lebih mahal daripada didaerah yg lain	0	0,00	6	5,45	31	28,18	36	32,73	37	33,64
Pupuk bersubsidi disalurkan kepada orang yang tepat (tepat sasaran).	0	0,00	6	5,45	31	28,18	31	28,18	42	38,18
Pupuk bersubsidi disalurkan oleh pemerintah kepada daerah yang tepat.	0	0,00	13	11,82	27	24,55	31	28,18	39	35,45
Ketersediaan pupuk di kecamatan silaen ini selalu terjamin.	3	2,73	12	10,91	28	25,45	37	33,64	30	27,27
Dalam membeli pupuk kami tidak dikenakan biaya transfortasi pupuk	1	0,91	18	16,36	38	34,55	40	36,36	13	11,82
Pupuk bersubsidi yang kami beli memiliki kualitas yang baik	1	0,91	16	14,55	31	28,18	41	37,27	21	19,09
Jenis pupuk bersubsidi yang sampai ke desa silaen ini ini sesuai dengan kebutuhan petani didaerah ini	0	0,00	16	14,55	45	40,91	42	38,18	7	6,36

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pilihan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah pilihan setuju, selanjutnya kurang setuju dan sangat setuju untuk seluruh daftar pertanyaan mengenai subsidi pupuk, data tersebut memberikan arti bahwa dengan adanya subsidi pupuk yang diberikan negara cukup tepat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat petani padi di desa silaen kabupaten Toba Samosir.

Penjelasan Responden Atas Variabel Produksi padi.

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel produksi padi (Y) adalah seperti pada Tabel 3 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 3. Penjelasan Responden atas Variabel Produksi padi

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Jumlah lahan pertanian (untuk padi) didesa silaen ini cukup luas.	2	1,82	8	7,27	19	17,27	56	50,91	25	22,73
Jumlah lahan pertanian (untuk padi) didesa kami terus-menerus bertambah.	3	2,73	11	10,00	24	21,82	55	50,00	17	15,45
Hasil produksi padi didesa ini cukup banyak	2	1,82	14	12,73	22	20,00	54	49,09	18	16,36
Hasil produksi padi didesa kami ini selalu mengalami peningkatan	1	0,91	7	6,36	28	25,45	41	37,27	33	30,00
Dengan adanya pupuk subsidi hasil produksi padi didesa ini meningkat	1	0,91	8	7,27	24	21,82	48	43,64	29	26,36
Adanya irigasi dapat meningkatkan produksi padi didaerah ini	1	0,91	5	4,55	36	32,73	37	33,64	31	28,18
Biaya produksi bertani padi didaerah kami saat ini cukup terjangkau	1	0,91	14	12,73	28	25,45	39	35,45	28	25,45
Panen padi didesa kami lebih dari sekali panen pertahun	0	0,00	12	10,91	25	22,73	35	31,82	38	34,55

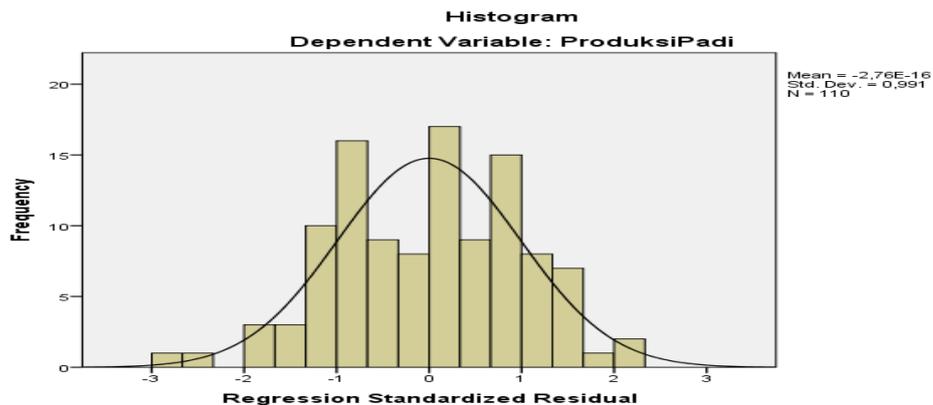
Sumber: Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pilihan jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden untuk seluruh pertanyaan tentang produksi padi adalah pilihan setuju yang menunjukkan bahwa produksi padi di desa Silaen cukup baik walaupun belum optimal yang ditandai banyaknya responden menjawab kurang setuju dan juga tidak setuju.

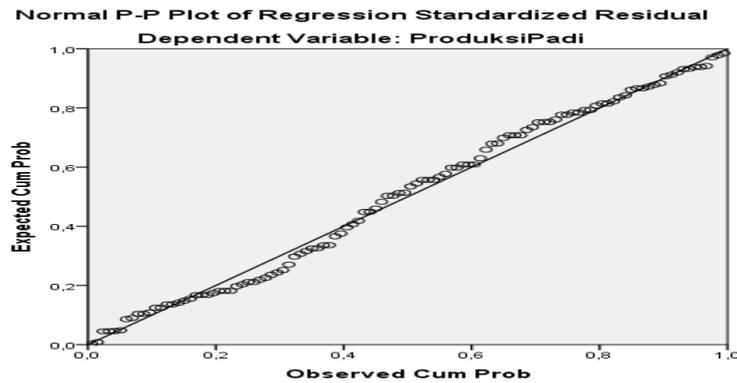
Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu tampilan grafik Histogram dan Grafik P-P Plot, tampilan grafik histogram terdapat pada Gambar 1 dibawah ini dimana grafik ini memberikan pola distribusi normal karena menyebar secara merata ke kiri dan ke kanan yang menunjukkan data sudah normal.



Gambar 1. Uji Normal Histogram



Gambar 2. Uji Normal P-P Plot

b. Uji Multikolonierisitas

Pengujian multikolonierisitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *collnarity statistic* dan nilai koefisien korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolonierisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonierisitas terjadi apabila (1) nilai *tolerance* ($Tolerance < 0.10$) dan (2) *Variance inflation faktor* ($VIF > 10$).

Berdasarkan Tabel 4.7 di bawah ini terlihat nilai VIF untuk variabel Subsidi pupuk, rehabilitasi irigasi, dan produksi padi lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0.10, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi atau tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonierisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	13,514	3,350			
1 RehabilitasiIrigasi	,301	,100	,276	,897	1,115
SubsidiPupuk	,298	,102	,267	,897	1,115

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

c. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah *homoskedastik* yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama, (Gujarati, 2005).

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan gambar scatterplot, apabila titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan model regresi terhindar dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian terlihat pada Gambar 3 dibawah ini :



Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3 di atas ditunjukkan bahwa titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0, serta tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat unsur heteroskedastisitas.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif, menunjukkan nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), rata - rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti untuk hipotesis, baik itu variabel bebas yaitu Subsidi pupuk, rehabilitasi irigasi , serta variabel terikat yaitu produksi padi . Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Analisis Deskripsi Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rehabilitas iIrigasi	110	18	35	26,45	3,765
Subsidi Pupuk	110	21	38	29,91	3,676
Produksi Padi	110	20	40	30,38	4,097
Valid N (listwise)	110				

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata variabel X_1 (rehabilitas irigasi) sebesar 26,45, nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 18 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,765. Rata-rata variabel X_2 (subsidi pupuk) sebesar 29,91 nilai tertinggi sebesar 38 dan nilai terendah sebesar 21 sedangkan standar deviasinya sebesar 3,675. Rata-rata variabel Y (produksi padi) sebesar 30,38 nilai tertinggi sebesar 40 dan nilai terendah sebesar 20 sedangkan stándar deviasinya adalah 4,097.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu variasi variabel bebas yaitu rehabilitasi irigasi dan Subsidi pupuk dalam menerangkan variasi variabel terikatnya yaitu produksi padi masyarakat petani padi di desa Silaen Kabupaten Tobasa. Nilai koefisien deterninasi R^2 dapat dilihat dalam Tabel 6:

Tabel 6 . Koefisien Determinan (Uji R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,442 ^a	,195	,180	3,710	2,207

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,195 atau 19,5 % yang menunjukkan kemampuan variabel rehabilitasi irigasi dan subsidi pupuk dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada produksi padi masyarakat petani di desa Silaen desa Silaen Kabupaten Tobasa sebesar 19,5%, sedangkan sisanya sebesar 80,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya rehabilitasi irigasi, luas lahan, pendidikan masyarakat dan lain - lain.

Uji Serempak (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan Tabel 7 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, sehingga keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan variabel bebas yaitu rehabilitasi irigasi X_1 dan subsidi pupuk X_2 mampu menjelaskan keragaman dari variabel terikat yaitu produksi padi masyarakat petani di desa Silaen desa Silaen Kabupaten Tobasa (Y) maka disimpulkan variabel rehabilitasi irigasi dan subsidi pupuk secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat petani padi di desa Silaen di Kabupaten Toba Samosir atau secara simultan subsidi pupuk dan rehabilitasi irigasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan produksi padi masyarakat petani padi di Desa Silaen Kabupaten Tobasa.

Tabel 7. Uji Serempak (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	357,370	2	178,685	12,983	,000 ^b
Residual	1472,594	107	13,763		
Total	1829,964	109			

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Uji Parsial (Uji t)

Sama halnya dengan pengujian hipotesis uji F di atas maka untuk menguji hipotesis pengaruh variabel subsidi pupuk dan rehabilitasi irigasi secara parsial dilakukan uji t, namun pengujian t dilakukan dengan menguji pengaruh rehabilitasi irigasi terhadap produksi padi masyarakat petani padi didesa Silaen Kabupaten Toba Samosir dan menguji pengaruh subsidi pupuk terhadap produksi padi masyarakat petani padi didesa Silaen Kabupaten Toba Samosir. Pengujian ini dilakukan dua arah, sehingga menggunakan tingkat signifikansi alpha 2,5% atau alpa dibagi dua. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan kriteria keputusan adalah :

Jika nilai signifikan < nilai alpa (0,025) H_0 ditolak atau H_1 diterima

Jika nilai signifikan > nilai alpa (0,025) H_0 diterima atau H_1 ditolak

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 13,514 dan nilai koefisien masing - masing variabel adalah sebesar 0,301 untuk X_1 , dan 0,298 untuk X_2 . Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 13,514 + 0,301 X_1 + 0,298 X_2$$

Dimana :

Y = Produksi padi

X_1 = Rehabilitasi Irigasi

X_2 = Subsidi pupuk

Tabel 8. Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	13,514	3,350		4,034	,000		
1 Rehabilitasi Irigasi	,301	,100	,276	3,016	,003	,897	1,115
Subsidi Pupuk	,298	,102	,267	2,921	,004	,897	1,115

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Dari Tabel di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai sig untuk variabel rehabilitasi irigasi (0,003) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel rehabilitasi irigasi, dengan demikian maka secara parsial variabel rehabilitasi irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat petani di desa Silaen Kabupaten Tobasa dengan demikian rehabilitasi irigasi sangat berperan dalam meningkatkan produksi padi masyarakat petani di desa Silaen Kabupaten Toba Samosir..
2. Nilai sig untuk variabel subsidi pupuk (0,004) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel subsidi pupuk. Dengan demikian maka secara parsial variabel subsidi pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat di desa Silaen kabupaten Toba samosir, dimana subsidi pupuk memberikan manfaat yang besar dalam mempengaruhi atau meningkatkan produksi padi masyarakat di desa Silaen kabupaten Toba Samosir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel variabel rehabilitasi irigasi dan subsidi pupuk secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat petani padi di desa Silaen di Kabupaten Toba Samosir yang ditandai dengan nilai signifikan (0,000) yang lebih kecil dari nilai alpha (0,05).
2. Secara parsial variabelrehabilitasi irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat petani padi di desa Silaen dikabupaten Toba Samosir yang ditandai dengan nilai sig (0,003) yang lebih kecil dari alpha (0,025).
3. Secara parsial variabel subsidi pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi masyarakat petani padi di desa Silaen dikabupaten Toba Samosir yang ditandai dengan yang ditandai dengan nilai sig (0,004) yang lebih kecil dari alpha (0,025).
4. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,195 atau 19,5% yang menunjukkan kemampuan variabel rehabilitasi irigasi dan subsidi pupuk dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada produksi padi masyarakat petani di desa Silaen desa Silaen Kabupaten Tobasa sebesar 19,5%, sedangkan sisanya sebesar 80,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya rehabilitasi irigasi, luas lahan, pendidikan masyarakat dan lain - lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. “Menggugat Implementasi Subsidi Langsung Tunai”. *Suarapublik*. Oktober 2005
- Benih Unggul dan Pupuk terhadap Usaha Tani dan Pengembangan Pedesaan. Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Direktorat Pengelolaan Air, 2010. *Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Tingkat Usahatani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES)*.Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Herman, A.S., Djumarman, dan H. Sukei. 2005. *Kajian Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi*. Laporan Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Jakarta
- Moh. Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Sihotang, C. H. P., Silalahi, M., Siregar, R. T., & Marbun, J. (2019). Pengaruh Persepsi, Perilaku, Dan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun . *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.575>
- Siregar, M. A. N., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit PTPN - IV Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Pembaangunan Wilayah Di Desa Kedai Damar Kecamatan Pabatu Kabupaten Serdang Badagei. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 39 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.578>
- Agustyawan, P. E., & Sabilla, A. A. (2021). Pengelolaan saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Jubel Kidul. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 113-120.
- Nugroho, A. D., Utami, S. N. H., Yuslianti, Y., Nurrokhmah, L., Al Huda, M. A., Suryani, L., ... & Adhini, H. A. N. (2017). pelaksanaan program upaya khusus (upsus) swasembada pangan di kabupaten Wonosobo provinsi Jawa tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 1-17.
- Novitaningrum, R., Supardi, S., & Marwanti, S. (2019). Efisiensi Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(2), 123-140.
- Astutik, S., & Suhardi, D. (2021, June). Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian. In *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur (Vol. 1)*.
- Saroinsong, M. F. C., Inkiriwang, R. L., & Sumanti, F. P. (2022). Analisis Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Tompaso Baru Minahasa Selatan. *TEKNO*, 20(81).
- Zakaria, A. K. (2014). Dampak Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perdesaan terhadap Adopsi Teknologi Budi Daya Padi.
- Hidayah, F. F. T., Verawati, L. Q. A., & Widjaja, H. (2020). Pemetaan Saluran Irigasi Sebagai Upaya Penyediaan Air Bagi Kebutuhan Pertanian (Studi Kasus: Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(4), 627-631.

**PENGARUH KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM
(PSU) TERHADAP HARGA JUAL PERUMAHAN DALAM PENGEMBANGAN
WILAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

Asril Nizar¹, Robert Tua Siregar², Sarintan E Damanik³, Elidawati Purba⁴

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor fasilitas umum apa yang dominan mempengaruhi harga jual rumah dan menganalisis kesesuaian fasilitas umum yang disediakan sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pengembang kepada masyarakat. Hasil penelitian dengan penyebaran kuisioner terhadap 82 penghuni perumahan pada kawasan Kota Pematangsiantar, diperoleh yaitu: (1) Ketersediaan fasilitas umum yang mempengaruhi konsumen dalam memilih lokasi rumah adalah ketersediaan fasilitas umum jalan, air minum, pembuangan air limbah, air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik jaringan telepon sangat mempengaruhi konsumen dalam memilih perumahan yang akan ditempati. (2) Analisis Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual Rumah Pada Perumahan Di Kawasan Kota Pematangsiantar menunjukkan hasil analisis regresi berganda bahwa pengaruh ketersediaan fasilitas umum terhadap harga yang ditawarkan bahwa R^2 atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R^2 sebesar 1,0 artinya bahwa fasilitas umum jalan, air minum, pembuangan air limbah, air hujan, pengelolaan sampah, fasilitas listrik, telepon dan angkutan umum berpengaruh 100 % terhadap harga jual rumah pada perumahan. Hal ini dapat dilihat dengan bentuk persamaan $Y = -0,253 + 0,843X_1 + 0,822X_2 + 1,014X_3 + 0,881X_4 + 1,076X_5 + 0,872X_6 + 1,175X_7 + 0,959X_8$. Pada uji t dapat dilihat nilai masing-masing variable bebas yang diteliti menerangkan bahwa fasilitas umum jalan memiliki nilai yang paling tinggi t_{hitung} sebesar 10,974 dan *signifikansi* sebesar 0,002. Nilai t_{hitung} tersebut menerangkan antara masing - masing faktor dengan tingkat pengaruh terhadap harga jual memiliki hubungan yang linier dan positif. (3) Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang yang dilakukan berdasarkan SWP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, perlu diperhatikan pemanfaatan ruang wilayah. Khususnya pemanfaatan lahan perumahan dan pendidikan sebagai pusat kegiatan yang mengalami peningkatan dan mengalami permintaan yang semakin tinggi.

Kata Kunci : Prasarana Utilitas Umum, Perumahan, Pengembangan Wilayah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze what public facility factors dominantly influence the selling price of houses and analyze the suitability of the public facilities provided in accordance with the price offered by the developer to the community. The results of the study by distributing questionnaires to 82 residents of housing in the Pematangsiantar City area, obtained namely: (1) Availability of public facilities that influence consumers in choosing the location of the house is the availability of public facilities roads, drinking water, waste water disposal, rainwater, garbage disposal, network telephone network electricity greatly influences consumers in choosing housing to be occupied. (2) The analysis of the effect of the availability of public facilities on the selling price of houses in housing in the Pematangsiantar City area shows the results of multiple regression analysis that the effect of the availability of public facilities on the price offered is that R^2 or the square of R indicates the coefficient of determination, the magnitude of R^2 is 1, 0 means that public facilities such as roads, drinking water, waste water disposal, rainwater, waste management, electricity, telephone and public

transportation have a 100% effect on the selling price of houses in housing. This can be seen in the form of the equation $Y = -0.253 + 0.843X_1 + 0.822X_2 + 1.014X_3 + 0.881X_4 + 1.076X_5 + 0.872X_6 + 1.175X_7 + 0.959X_8$. In the *t* test, it can be seen that the value of each independent variable studied explains that public road facilities have the highest *t* count value of 10.974 and a significance of 0.002. The *t* count value explains that between each factor and the level of influence on the selling price has a linear and positive relationship. (3) The housing development carried out by the developer is carried out based on the SWP that has been determined by the Pematangsiantar City Government, it is necessary to pay attention to the utilization of regional space. In particular, the use of residential and educational land as activity centers has experienced an increase and is experiencing an increasingly high demand.

Keywords: Public Utility Infrastructure, Housing, Regional Development

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang dan pangan adalah tempat tinggal atau rumah dimana tempat manusia dapat berlindung dan mempertahankan hidupnya. Dalam Undang – Undang RI Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga sedangkan yang dimaksud dengan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan .

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2010), diketahui bahwa pola pembangunan perumahan dapat dikategorikan atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di satu sisi dan pembangunan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat di sisi lainnya. Data empiris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2010) menunjukkan bahwa cara pengadaan perumahan formal mampu menyediakan $\pm 15\%$ dari kebutuhan perumahan nasional setiap tahunnya. Kekurangan sebesar 85% kebutuhan dipenuhi sendiri secara swadaya oleh masyarakat. Pola pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah serta pengembang swasta adalah skema pengadaan perumahan yang ditawarkan melalui mekanisme pasar formal dengan fasilitas kredit bagi pembelinya.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping sebagai tempat tinggal yang layak, rumah juga dapat digunakan untuk tempat usaha. Maka untuk menunjang hal tersebut diperlukan fasilitas umum yang memadai. Fasilitas umum yang merupakan satu kesatuan dari suatu kawasan perumahan yang diadakan pengembang untuk kepentingan umum. Contoh : jalan, angkutan umum, instalasi air limbah, instalasi air bersih, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa pihak pengembang harus menyediakan lahan untuk kepentingan umum. Penyediaan fasilitas umum perumahan oleh pengembang minimal 20-30% dari luas lahan. Dengan persentase pengadaan fasilitas umum yang begitu besar banyak para pengembang yang tidak menyediakan fasilitas umum tersebut.

Pengurangan fasilitas umum yang diberikan oleh pengembang tidak disertai dengan pengurangan harga rumah yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa harga properti terus meningkat. Peningkatan harga properti di Jakarta melonjak 38 persen dan harga properti di

Bali naik 21 persen sepanjang 2012 (Kurniawan, 2013). Peningkatan harga properti di Sumatera Utara saat ini dikarenakan factor kondisi lahan yang semakin sedikit. Serta adanya Perda yang mengatur tentang alih fungsi lokasi menjadi lokasi hunian, dimana nantinya hanya dijadikan kawasan hijau.

Peningkatan harga properti yang tidak terkendali ini menyebabkan keraguan dari pihak lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kredit perumahan, yang dimana sebagian konsumen membeli rumah menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan. Keraguan itu diakibatkan karena harga jual perumahan oleh pengembang yang terlalu tinggi. Sedangkan harga penilaian oleh lembaga penilai properti/*appraisal* jauh dibawah harga yang ditawarkan oleh pengembang.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai fasilitas dan harga rumah serta laju pertumbuhan penduduk di Pematangsiantar yang terus meningkat setiap tahunnya, maka untuk itulah beberapa pengembang melakukan pembangunan perumahan yang terletak di kawasan Mangupura. Kawasan Mangupura dipilih sebagai lokasi pembangunan perumahan, karena harga lahan untuk pembangunan relatif terjangkau.

Sebagian besar fasilitas umum yang disediakan oleh pengembang dikawasan mangupura berupa fasilitas umum jalan, air minum, air limbah, air hujan, jaringan listrik, jaringan telepon, pembuangan sampah. Namun fasilitas umum angkutan umum tidak disediakan oleh pengembang hal tersebut karena lokasi perumahan berada di jalur yang sudah tersedia transportasi umum.

Fasilitas umum berupa jalan di beberapa perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar dalam keadaan baik dan sesuai dengan standar jalan untuk perumahan. Hal tersebut dilihat dari lebar jalan yang sudah disesuaikan dengan jenis perumahan. Air minum sebagai kebutuhan primer, disediakan oleh pengembang bersumber dari perusahaan daerah air minum dan bersumber air tanah yang disediakan sendiri oleh penghuni. Standar minimal untuk pengolahan air limbah yang disediakan oleh pengembang adalah septiktank pada masing - masing rumah. Fasilitas umum pembuangan air hujan yang tersedia berupa saluran drainase. Beberapa perumahan menyediakan saluran drainase tertutup dan ada pula yang menyediakan saluran drainase terbuka. Fasilitas umum yang tidak kalah pentingnya dalam suatu perumahan adalah pengolahan sampah. Pengembang menyediakan bak sampah pengumpul yang besarnya sesuai dengan jumlah rumah. Selanjutnya sampah tersebut diambil oleh petugas kebersihan yang selanjutnya dibawa ke TPA. Fasilitas umum jaringan listrik yang bersumber dari PLN disediakan oleh pengembang dengan daya masing-masing rumah sebesar 1.300watt, dan dalam perkembangannya beberapa rumah dalam perumahan menambah daya listriknya secara individu. Dari penjelasan diatas peneliti merasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual Perumahan di Daerah Kota Pematangsiantar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut (Nawawi, 2003) metode deskriptif kuantitatif yaitu metode - metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi

yang rasional dan akurat. Dalam pengambilan data yang dilakukan ada dua melalui wawancara dan hasil kuisioner yang telah disebar dilapangan. Sedangkan data pendukung dari pengembang, laporan - laporan, buku - buku serta tesis yang telah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis

Kota Pematangsiantar terletak pada garis $2^{\circ}53'20''$ - $3^{\circ}01'0''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}1'00''$ - $99^{\circ}6'35''$ Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Secara administrasi wilayah Kota Pematangsiantar terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu : Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar, Marimbun, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Siantar Sitalasari.

Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 km² terletak 400-500 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar. Karena terletak di garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong kedalam daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum 30,4⁰C dan suhu minimum rata-rata 21,1⁰C pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penduduk kota Pematangsiantar mencapai 237.434 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.969 jiwa per km². Penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 115.787 jiwa dan penduduk perempuan 121.647 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematngsiantar sebesar 97,30.

Pola Penataan Ruang Kota Pematangsiantar

Sebagai salah satu kawasan kota, Kota Pematangsiantar merupakan daerah yang cukup strategis yaitu pada jalur utama lalu-lintas Kabupaten Karo dan Kabupaten Sergei, Kabupaten Asahan. Tingkat aksesibilitas yang memberikan pengaruh pada kemudahan interaksi internal dan juga eksternal dengan kota sekitarnya antara lain Medan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar, Kota Pematangsiantar termasuk dalam Satuan Pengembangan Wilayah Kota yaitu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) I dan sebagai pusat pengembangan, dengan fungsi utama selain sebagai fasilitas permukiman penduduk adalah sebagai pusat administrasi pemerintahan kota dan pusat sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri.

Bila dilihat pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) secara administratif kawasan Kota Pematngsiantar terdiri atas 53 (lima puluh tiga) Kelurahan, dengan luas wilayah 22,723 km². Fokus perhatian dalam pepenataan ruang terletak pada struktur tata ruang, yang menunjukkan tata jenjang (hirarki) pelayanan dan perkembangan penggunaan ruang wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu.

Struktur tata ruang menunjukkan kelompok-kelompok pengembangan dengan pusat-pusat pengembangan yang direncanakan. Sedangkan dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang dibentuk Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Sub Wilayah Pembangunan (SWP) tersebut adalah sebagai berikut:

1. SWP I meliputi dengan sektor utamanya perdagangan di Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara, industri : Kecamatan Siantar Timur dan Siantar Martoba, pertanian Siantar Marimbun dan Siantar Marihat.
2. SWP II meliputi Petanahan, dengan pusat pengembangan di Siantar Sitalasari dan Siantar Martoba, sektor utama perikanan, dan pertanian Kecamatan Siantar Marihat dan Siantar Simarimbun
3. SWP III meliputi pendidikan : Kecamatan Siantar Selatan dan Siantar Sitalasari.

Di samping pembangunan yang dilakukan berdasarkan SWP yang telah ditetapkan, perlu diperhatikan pemanfaatan ruang wilayah. Khususnya pemanfaatan lahan sawah sebagai pusat kegiatan agraris yang mengalami penurunan dan semakin mengalami penyempitan (RPJM Kota Pematangsiantar 2010 - 2025).

Penataan ruang diperlukan sebagai salah satu arahan dalam perencanaan pembangunan karena pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial/keruangan dan bersinergis antar sektor agar pemanfaatan ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga kota tidak berkurang kemampuannya.

a. Kependudukan

Pada dasarnya penduduk adalah merupakan modal dasar pembangunan oleh karena itu data statistik kependudukan mutlak diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan segala aspeknya. Penduduk Kota Pematangsiantar 289.975 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Pematangsiantar selama tahun 2010 – 2014 sebesar 2% atau 0,5% per tahun, yaitu dari 236.937 jiwa pada tahun 2012 menjadi 289.975 jiwa pada tahun 2014. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan di Kota Pematangsiantar selama periode 2012 – 2014 didominasi oleh perempuan dengan perbandingan Sex Ratio berkisar 91,17% yang berarti jumlah perempuan lebih banyak sekitar 1 – 2 % dibandingkan jumlah laki - laki.

Pertumbuhan jumlah keluarga dalam kurun waktu tiga tahun sebesar 2,2% per tahun yang diikuti dengan pertumbuhan kepadatan 2,96 KK perkilometer persegi. Jumlah anggota keluarga, rata - rata di Kota Pematangsiantar selama tahun 2012 – 2014 berjumlah 5 jiwa. Penduduk usia kerja umur 15 – 54 tahun yaitu 1.830 orang. (RPJM Kota Pematangsiantar, 2015)

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2014

No	Kecamatan	JumlahPenduduk (Jiwa)		
		2012	2013	2014
1.	Siantar Barat	34.984	35.457	43.673
2.	Siantar Utara	46.423	46.613	58.077
3.	Siantar Timur	38.454	38.613	44.937
4.	Siantar Selatan	17.101	17.150	21.690
5.	Siantar Martoba	38.368	38.750	48.985
6.	Siantar Marihat	17.872	18.191	22.245
7.	Siantar Marimbun	14.642	14.884	17.811
8.	Siantar Sitalasari	26.845	27.279	32.557
	Total	234.698	236.937	289.975

Sumber : Pematangsiantar dalam Angka (diolah)

HASIL PENELITIAN

Analisis Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual Rumah Pada Perumahan Di Kawasan Kota Pematangsiantar

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh ketersediaan fasilitas umum terhadap harga yang ditawarkan dalam memiliki rumah pada kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar, Dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi, yaitu korelasi/hubungan antara delapan variable bebas terhadap variabel terikat. Angka R yang didapat 1,0a (lampiran 3) artinya adanya hubungan yang sangat erat antara variabel jalan, air minum, air limbah, air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, angkutan umum terhadap kepuasan penghuni karena nilai yang dimiliki 1. Jika nilai sama dengan 1, maka hubungan sangat erat, dan sebaliknya jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah.

R Square (R²) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R² sebesar 1,0 artinya bahwa fasilitas umum jalan, air minum, pembuangan air limbah, air hujan, pengelolaan sampah, fasilitas listrik, telepon dan angkutan umum berpengaruh 100% terhadap harga jual rumah pada perumahan. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 100%.

Uji Model

Analisis yang menguji koefisien regresi secara bersama-sama adalah analisis varian atau yang disebut Anova, analisis ini berperan untuk menguji *signifikansi* pengaruh jalan, air minum, air limbah, air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, angkutan umum secara bersama-sama dengan menggunakan tingkat *signifikansi* sebesar 0,00. Hasil dari penelitian yang dilakukan mendapatkan nilai F sebesar 0,00 dengan *signifikansi* 0,000^b, selanjutnya dilakukan uji F dengan langkah-langkah :

- a. Ho = konstanta tidak berpengaruh terhadap harga jual
 Ha = konstanta berpengaruh terhadap harga jual
- b. F hitung dan *signifikansi* dari output diperoleh Fhitung sebesar 0,00 dan *signifikansi* 0,000a
- c. Penentuan *Ftabel* pada *signifikansi* 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 8 dan df 2 (n-k-1) atau 82-8-1=73(n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas). Hasil yang diperoleh untuk *Ftabel* sebesar 2,072
- d. F hitung < *Ftabel* (0,00 < 2,072) dan *signifikansi* < 0,05, maka Ha diterima.

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum yang diberikan oleh pihak pengembang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penghuni di kawasan Kota Pematangsiantar. Hasil analisis Anova dalam regresi ganda dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.

Hasil Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Analisis Koefisien Pada Regresi Ganda

Faktor	Unstandardized coefficient		Standardized coefficient		Sig.
	B	Std. error	Beta	t	
(Constant)	-0,253	0,00		0,00	0,00
Jalan	0,843	0,77	0,988	10,974	0,002
Air Minum	0,822	0,101	0,978	8,111	0,04
Air Limbah	1,014	0,031	0,999	32,806	0,000
Air Hujan	0,881	0,130	0,969	6,787	0,007
Pembuangan Sampah	1,076	0,095	0,989	11,336	0,001
Jaringan Listrik	0,872	0,047	0,996	18,533	0,000
Jaringan Telepon	1,175	0,623	0,736	1,886	0,156

Angkutan Umum	0,959	0,056	0,995	17,021	0,000
---------------	-------	-------	-------	--------	-------

Sumber : data primer diolah tahun 2016

Tabel menjelaskan bahwa *Unstandardized coefficients* merupakan nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak memiliki patokan. Koefisien B terdiri dari nilai konstan (harga Y jika $X_1, X_2, X_3, \dots, X_8 = 0$) dan koefisien regresi (nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X_1 dan X_2). Nilai-nilai inilah yang dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda. Sedangkan, Std. Error adalah maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari thitung dengan cara koefisien dibagi *standard error*.

Persamaan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Atau

$$Y = -0,253 + 0,843X_1 + 0,822X_2 + 1,014X_3 + 0,881X_4 + 1,076X_5 + 0,872X_6 + 1,175X_7 + 0,959X_8$$

Keterangan :

Y : Kepuasan Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual

X1 : Fasilitas Umum Jalan

X2 : Fasilitas Umum Air Minum

X3 : Fasilitas Umum Air Limbah

X4 : Fasilitas Umum Pembuangan Air Hujan

X5 : Fasilitas Umum Pembuangan Sampah

X6 : Fasilitas Umum Jalan Jaringan Listrik

X7 : Fasilitas Umum Jaringan Telepon

X8 : Fasilitas Umum Ngkutan Umum

Interpretasi model regresi yang diperoleh :

1. Pengujian koefisien fasilitas umum jalan memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum jalan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 0,843 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
2. Pengujian koefisien fasilitas umum air minum memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum air minum sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 0,822 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
3. Pengujian koefisien fasilitas umum air limbah memberikan pengaruh yang negatif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum air limbah sebesar 1 satuan akan mengurangi Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 1,014 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
4. Pengujian koefisien fasilitas umum air hujan memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum air hujan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 1,014 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
5. Pengujian koefisien fasilitas umum pembuangan sampah memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum pembuangan sampah sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan

- akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 1,076 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
6. Pengujian koefisien fasilitas umum jaringan listrik memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum jaringan listrik sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 0,872 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
 7. Pengujian koefisien fasilitas umum jaringan telepon memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum jaringan telepon sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 1,175 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.
 8. Pengujian koefisien variable fasilitas umum angkutan umum memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual perumahan. Peningkatan nilai fasilitas umum angkutan umum sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepuasan akan ketersediaan fasilitas umum sebesar 0,959 dengan asumsi variable bebas yang lain dalam regresi ini tetap.

Uji t

Hasil uji derajat hubungan ditunjukkan untuk melihat signifikansi pengaruh parameter terhadap variable terikat yang dianalisis yaitu pendapatan petani kopi. Dari hasil perhitungan uji signifikansi dengan uji t diperoleh hasil bahwa pendapatan petani dengan parameter derajat hubungan yang tidak signifikan. Keempat parameter tersebut adalah potensi lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen dan pasca panen dan pemasaran dengan tingkat signifikansi 5%. Langkah - langkah untuk uji t adalah sebagai berikut :

Pengujian koefisien variable fasilitas umum jalan

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 10,974 dan *signifikansi* sebesar 0,002 (Lampiran 2)
- b. Penentuan t_{tabel} pada signifikansi 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,002 > -1,994)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum jalan yang disediakan pengembang sangat berpengaruh signifikan terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum air minum

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 8,111 dan *signifikansi* sebesar 0,004 (Lampiran 3)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,004 > -1,994)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum air minum yang disediakan pengembang sangat berpengaruh signifikan terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum air limbah

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 32,806 dan *signifikansi* sebesar 0,00 (Lampiran 4)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,00 > -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum air limbah yang disediakan pengembang signifikan terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum air hujan

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 6,787 dan *signifikansi* sebesar 0,007 (Lampiran 5)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,007 < -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum air hujan yang disediakan pengembang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum pembuangan sampah

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 11,336 dan *signifikansi* sebesar 0,001 (Lampiran 6)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,001 < -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum pembuangan sampah yang disediakan pengembang sangat berpengaruh terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum jaringan listrik

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 18,433 dan *signifikansi* sebesar 0,000 (Lampiran 7)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994
- c. $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,000 < -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum jaringan listrik yang disediakan pengembang berpengaruh terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum jaringan telepon

- a. t_{hitung} dan *signifikansi* dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 1,886 dan *signifikansi* sebesar 0,156 (Lampiran 8)
- b. Penentuan t_{tabel} pada *signifikansi* 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994

c. $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,156 > -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum jaringan telepon yang disediakan pengembang sangat berpengaruh terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Pematangsiantar.

Pengujian koefisien variable fasilitas umum angkutan umum

a. t_{hitung} dan signifikansi dari output diperoleh t_{hitung} sebesar 17.021 dan signifikansi sebesar 0.000 (Lampiran 10)

b. Penentuan t_{tabel} pada signifikansi 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df = (n - k - 1)$ atau $82 - 8 - 1 = 71$ (nadalah jumlah data dan k adalah jumlah variable bebas). Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar -1,994

c. $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,000 < -1,994$)

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum angkutan umum yang disediakan pengembang sangat berpengaruh terhadap harga jual di kawasan perumahan di kawasan Pematangsiantar.

PEMBAHASAN

Dalam membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya diintegrasikan dengan teori yang ada sehingga dapat menjawab masalah yang diajukan.

a. Faktor Fasilitas Umum Yang Dominan Mempengaruhi Harga Jual Rumah

Konsumen dalam memilih perumahan sangat tergantung dari fasilitas umum yang disediakan. Dalam penelitian ini ketersediaan fasilitas umum yang menjadi pertimbangan ada 8 faktor, diantaranya adalah fasilitas umum jalan, air minum, air limbah, air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, angkutan umum.

b. Faktor Fasilitas Umum Jalan

Faktor fasilitas umum jalan yang disediakan pengembang yang menjadi salah satu acuan dalam memiliki rumah pada kawasan perumahan. Tingkat rata - rata sangat sesuai fasilitas umum jalan menempati urutan tertinggi yaitu dengan persentase 42,83 %, dimana termasuk pada nilai sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Dengan persentase 42,83 masyarakat yang membeli perumahan dalam fasilitas jalan umum merasa cukup puas.

Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,843, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan berpengaruh dengan harga jual rumah.

c. Faktor Fasilitas Umum Air Minum

Faktor fasilitas umum air minum yang disediakan pengembang yang menjadi salah satu acuan dalam memiliki rumah pada kawasan perumahan nilai ketersediaan fasilitas umum air minum memiliki tingkat persentase tertinggi dengan nilai 32,17 persen yang dimana termasuk pada nilai diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Fasilitas Air minum yang disediakan oleh pengembang pada umumnya masyarakat kurang puas. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,822, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah..

d. Faktor Fasilitas Umum Air Limbah

- Faktor fasilitas umum pembuangan air limbah yang disediakan pengembang dengan persentase tertinggi adalah sebesar 41,84 persen. Nilai tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas umum pembuangan air limbah sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Masyarakat merasa cukup puas dengan fasilitas pembuangan air limbah yang disediakan oleh pengembang. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 1,014, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.
- e. Faktor Fasilitas Umum Pembuangan Air Hujan
- Faktor fasilitas umum pembuangan air hujan yang disediakan pengembang yang menjadi salah satu acuan dalam memiliki rumah pada kawasan perumahan persentase 51,17. Nilai tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas umum pembuangan air hujan memiliki tingkat nilai 51,17 yang dimana termasuk pada nilai diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Fasilitas pembuangan air hujan yang tersedia masyarakat merasa puas, hal ini dapat dilihat bahwa perumahan yang ada tidak pernah mengalami banjir akibat air hujan. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,881, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.
- f. Faktor Fasilitas Umum Pembuangan Sampah
- Faktor fasilitas umum pembuangan sampah yang disediakan pengembang bahwa ketersediaan fasilitas pembuangan sampah memiliki tingkat nilai 43,83 yang dimana termasuk pada nilai sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan pada daerah atau pemukiman perumahan telah bekerja sama dengan dinas kebersihan Kota Pematangsiantar, sehingga waktu pengumpulan sampah sudah dapat diketahui oleh warga sekitar. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 1,076 nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.
- g. Faktor Fasilitas Umum Jaringan Listrik
- Faktor fasilitas umum jaringan listrik yang disediakan pengembang dengan persentase tertinggi 56,83. Nilai tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas umum jalan memiliki tingkat nilai 56,83 yang dimana termasuk pada nilai sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Dengan fasilitas yang ada masyarakat merasa cukup puas karena kebutuhan listrik seperti saat ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan rumah. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,872, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.
- h. Faktor Fasilitas Umum Jaringan Telepon
- Faktor fasilitas umum pembuangan sampah yang disediakan pengembang dengan persentase 49,17. Nilai tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas umum jaringan telepon memiliki tingkat nilai 49,17 yang dimana termasuk pada nilai sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Fasilitas jaringan telepon merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat terutama di kawasan perumahan, walaupun seperti saat ini pada umumnya sudah memiliki hand phone namun fasilitas jaringan telepon di rumah merupakan salah satu kebutuhan dalam rumah tangga.

Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 1,175, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.

i. Faktor Fasilitas Umum Angkutan Umum

Faktor fasilitas umum angkutan umum yang disediakan pengembang yang dengan persentase 32,83. Nilai tersebut menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas umum angkutan umum memiliki tingkat nilai 32,83 yang dimana termasuk pada nilai sangat diminati oleh penghuni yang akan memiliki rumah pada kawasan perumahan. Angkutan umum yang ada pada kawasan perumahan sudah ada tetapi kuantitas untuk masuk ke kawasan perumahan masih kurang, demikian sebaliknya perumahan dibangun pada kawasan yang jauh dari keramaian agar lokasi perumahan akhirnya mengalami kemajuan salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sehingga transportasi angkutan umum dapat semakin lancar. Hasil dari perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi didapat nilai Beta yaitu 0,959, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara fasilitas umum jalan dengan harga jual rumah.

j. Kesesuaian Ketersediaan Fasilitas Umum Yang Diberikan Dengan Harga Yang Ditawarkan Pengembang

Penelitian ini didasarkan atas delapan faktor fasilitas umum yang menjadi parameter penelitian yang dimana dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam memiliki rumah dalam kawasan perumahan. Kedelapan faktor fasilitas umum tersebut adalah Fasilitas Umum Jalan , Fasilitas Umum Pembuangan Sampah, Fasilitas Umum Air Limbah, Fasilitas Umum Jaringan Listrik, Fasilitas Umum Air Minum, Fasilitas Umum Jaringan Telepon, Fasilitas Umum Angkutan Umum, Fasilitas Umum Pembuangan Air Hujan.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kedelapan fasilitas umum tersebut, sedangkan menjadi variabel terikat adalah ketersediaan fasilitas umum terhadap harga yang ditawarkan. Kedelapan fasilitas yang ditawarkan oleh pengembang dapat dilihat pada Gambar berikut.

Pada uji t dapat dilihat nilai masing-masing variable bebas yang diteliti menerangkan bahwa fasilitas umum jalan memiliki nilai yang paling tinggi t_{hitung} sebesar 10,974 dan *signifikansi* sebesar 0,002. Nilai t_{hitung} tersebut menerangkan antara masing - masing faktor dengan tingkat pengaruh terhadap harga jual memiliki hubungan yang linier dan positif.

Pengembangan Wilayah di Kota Pematangsiantar

Struktur tata ruang menunjukkan kelompok-kelompok pengembangan dengan pusat-pusat pengembangan yang direncanakan. Sedangkan dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang dibentuk Sub Wilayah Pembangunan (SWP). Sub Wilayah Pembangunan (SWP) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 SWP I meliputi dengan sektor utamanya perdagangan di Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara, industri : Kecamatan Siantar Timur dan Siantar Martoba, pertanian Siantar Marimbun dan Siantar Marihat.
- 2 SWP II meliputi Petanahan, dengan pusat pengembangan di Siantar Sitalasari dan Siantar Martoba, sektor utama perikanan, dan pertanian kecamatan Siantar Marihat dan Siantar Simarimbun
- 3 SWP III meliputi perumahan dan pendidikan : Kecamatan Siantar Selatan dan Siantar Sitalasari.

Penataan ruang diperlukan sebagai salah satu arahan dalam perencanaan pembangunan karena pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial/keruangan dan bersinergis antar sektor agar pemanfaatan ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga kota tidak berkurang kemampuannya. Di samping pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang yang dilakukan berdasarkan SWP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar, perlu diperhatikan pemanfaatan ruang wilayah. Khususnya pemanfaatan lahan perumahan dan pendidikan sebagai pusat kegiatan yang mengalami peningkatan dan mengalami permintaan yang semakin tinggi (RPJM Kota Pematangsiantar, 2010-2025).

KESIMPULAN

Setiap kawasan perumahan menyediakan fasilitas umum sesuai dengan luasan. Type, serta kesesuaian dengan daerah sekitarnya. Penyediaan fasilitas umum juga tergantung dari developer yang mengembangkan kawasan perumahan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan pada perumahan dikawasan mangupura ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan pada bab sebelumnya, fasilitas umum yang mempengaruhi harga jual rumah pada kawasan perumahan adalah faktor fasilitas umum jalan, fasilitas umum pembuangan sampah, dan fasilitas umum jaringan listrik. Yang dimana ketiga fasilitas umum tersebut sangat berpengaruh terhadap minat konsumen dalam memiliki rumah di kawasan perumahan. Pernyataan akan fasilitas umum jalan, air minum, air limbah, air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telepon, angkutan umum yang merupakan fasilitas umum yang mempengaruhi harga jual rumah juga didapat dari analisa linier berganda yang dimana memiliki nilai *Standardized coefficient Beta* yang secara berturut-turut adalah 0.843, 0.822, 1.014, 0.881, 1.076, 0.872, 1.175, 0.959. Setiap faktor fasilitas umum yang disediakan oleh pengembang sangat mempengaruhi nilai jual dari perumahan tersebut. Ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan seperti uji F, ditemukan bahwa pengaruh variable bebas terhadap tingkat kesesuaian ketersediaan fasilitas umum yang disediakan pengembang terhadap harga rumah di kawasan Kota Pematangsiantar secara bersama-sama memiliki pengaruh. Hal ini juga diperkuat dari hasil frekuensi jawaban responden yang menyatakan kesesuaian ketersediaan fasilitas umum terhadap harga jual yang ditawarkan pengembang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen dalam memiliki rumah pada kawasan perumahan. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil yang menunjukkan tingkat sangat sesuai memiliki nilai paling tinggi yaitu 56,83%. Maka dari itu hampir setengah dari warga perumahan yang menempati perumahan di kawasan Kota Pematangsiantar sangat puas akan ketersediaan fasilitas umum yang disediakan oleh pengembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. Undang-undang no 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Rakyat.
Anonim. Standar Nasional Indonesia 03-1733-2009
Budihardjo, Eko, 1997. a. "*Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*". Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
_____, 1997. "*Tata Ruang Perkotaan*". Penerbit Alumni, Bandung.
_____, *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung, 1991

- Dwivedi, Anju, 2003, *Metodelogi Pelatihan Partisipatif*, Pondok Edukasi, Bantul Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia, 2007. Direktori 2006.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2003, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- _____. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman*. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Intan Suswita, Darwin Damanik, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnemi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.36985/ekuilnemi.v2i1.346>
- Tatang Syahban Adi Syahputra, Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnemi*, 3(2), 104–114
- Nugrahandika, W. H., & Pramono, R. W. D. (2017). Lokalitas Pengaturan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Di DIY: Tipologi Permasalahannya.
- Vitriana, A. (2019). The Difficulties in the Handover of Housing Infrastructure, Facility, and Utility in the Greater Bandung Area. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 149-157.
- Lestari, M. D., & Wahyuhana, R. T. (2022). Analisis Kualitas Ketersediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pada Kawasan Permukiman Studi Kasus Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati (Doctoral dissertation, University of Technology Yogyakarta).
- Sutanto, D. H. (2021). Kebijakan dan Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Pamekasan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1489-1503.
- Nurhakim, M. A., & Pandamdari, E. (2018). Pemenuhan atas sarana dan utilitas pada perumahan subsidi Mutiara Puri Harmoni Rajeg Tangerang menurut undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 437-461.